

Berita Jumat, 14 Agustus

Kesimpulan

Berita internasional pada Jumat, 14 Agustus 2026 menunjukkan bahwa perekonomian global masih berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian akibat konflik geopolitik, perubahan harga energi, serta arah kebijakan moneter negara-negara besar. Meskipun demikian, sejumlah negara masih mampu menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup baik. Malaysia menjadi salah satu contoh karena ekonominya tumbuh 6% pada kuartal II 2026, lebih tinggi dari perkiraan awal 5,8%, terutama karena kuatnya ekspor yang berkaitan dengan industri semikonduktor dan perkembangan kecerdasan buatan (AI), serta permintaan domestik yang tetap stabil. Kondisi tersebut membantu Malaysia menahan dampak perang di Timur Tengah dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat di Asia Tenggara.

Ketahanan Malaysia tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan sektor ekspor masih menjadi salah satu sumber penting pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Ekspor produk elektronik dan listrik, semikonduktor, serta peningkatan ekspor minyak dan gas memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi Malaysia, sementara investasi asing dan proyek-proyek baru juga membantu menjaga momentum pertumbuhan. Namun, kondisi tersebut tidak berarti Malaysia sepenuhnya terbebas dari risiko karena Bank Negara Malaysia masih memperhatikan kemungkinan meningkatnya kembali ketegangan di Timur Tengah, gangguan jalur pelayaran, dampak El Niño, volatilitas pasar keuangan global, serta perlambatan ekonomi mitra dagang. Dengan demikian, pertumbuhan Malaysia yang kuat tetap membutuhkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko eksternal yang dapat memengaruhi perdagangan dan investasi.

Di sisi lain, konflik Amerika Serikat dan Iran masih menjadi salah satu sumber ketidakpastian terbesar bagi perekonomian dunia. Amerika Serikat berencana menerapkan sanksi ekonomi yang disebut sebagai salah satu langkah paling besar dalam sejarah isolasi ekonomi terhadap Iran, sekaligus melanjutkan tekanan melalui blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Kondisi ini terjadi ketika perekonomian Iran telah mengalami kerusakan besar akibat perang dan penurunan ekspor minyak, tetapi Iran masih mempertahankan kemampuannya untuk bertahan serta mempertahankan pengaruhnya terhadap Selat Hormuz. Padahal, Selat Hormuz merupakan jalur strategis karena sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia melewati kawasan tersebut. Karena itu, belum adanya kesepakatan yang jelas mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz membuat risiko terhadap perdagangan energi global masih tetap tinggi.

Perkembangan tersebut kemudian berkaitan langsung dengan kondisi harga energi dan inflasi di berbagai negara. Di Amerika Serikat, data menunjukkan inflasi harga produsen pada Juli 2026 melambat menjadi 4,7% secara tahunan, dari 5,5% pada Juni, sementara harga energi turun 3,1% dan harga pangan juga mengalami penurunan. Kondisi ini memberikan sedikit ruang bagi The Fed untuk mempertimbangkan kebijakan suku bunga karena tekanan harga mulai menunjukkan tanda-tanda mereda. Namun, tidak semua pejabat The Fed memiliki pandangan yang sama. Beth Hammack dari Federal Reserve Bank of Cleveland masih menilai bahwa perlambatan inflasi belum tentu berlanjut dan mendorong kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin karena menurutnya kebijakan moneter saat ini belum cukup membatasi perekonomian.

Situasi ekonomi Amerika Serikat juga memperlihatkan adanya perkembangan yang beragam antara inflasi dan pasar tenaga kerja. Klaim awal tunjangan pengangguran meningkat 9.000 menjadi 209.000 orang pada pekan yang berakhir 8 Agustus 2026, meskipun klaim berkelanjutan turun menjadi 1,78 juta. Kenaikan klaim awal tersebut belum dapat langsung dianggap sebagai tanda melemahnya pasar tenaga kerja secara serius karena dapat dipengaruhi faktor musiman selama musim panas. Oleh karena itu, The Fed masih perlu menunggu lebih banyak data sebelum menentukan arah kebijakan suku

bunga berikutnya. Dengan demikian, perekonomian Amerika berada dalam posisi yang cukup kompleks karena inflasi mulai melandai, tetapi pasar tenaga kerja juga mulai menunjukkan beberapa tanda perubahan sehingga kebijakan moneter harus dilakukan secara hati-hati.

Sementara itu, perekonomian Eropa mulai menunjukkan perbaikan setelah mengalami pertumbuhan yang sangat terbatas pada awal 2026. Data awal Eurostat menunjukkan ekonomi kawasan euro tumbuh 0,4% secara kuartalan pada kuartal II 2026, sedangkan ekonomi Uni Eropa secara keseluruhan tumbuh 0,5%. Angka tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan kuartal I ketika pertumbuhan kawasan euro stagnan 0% dan Uni Eropa hanya tumbuh 0,1%. Pasar tenaga kerja juga relatif stabil karena penyerapan tenaga kerja di kawasan euro dan Uni Eropa sama-sama tumbuh 0,1%. Namun, perbaikan tersebut masih tergolong moderat dan data yang dirilis masih berupa estimasi awal sehingga masih dapat mengalami revisi.

Berbeda dengan perlambatan inflasi di Amerika Serikat, Prancis justru mengalami kenaikan tekanan harga. Inflasi Prancis pada Juli 2026 meningkat menjadi 2,1% secara tahunan dari 1,8% pada Juni, terutama akibat kenaikan harga energi dan jasa. Harga energi bahkan meningkat 12,6% secara tahunan, sedangkan inflasi sektor jasa naik menjadi 2,2%. Secara bulanan, inflasi meningkat 0,6% karena periode liburan musim panas mendorong kenaikan harga transportasi dan akomodasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik dan perubahan harga energi masih memberikan dampak yang berbeda-beda terhadap negara-negara Eropa, sehingga kebijakan ekonomi dan moneter harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing negara.

Berbagai perkembangan internasional tersebut memberikan gambaran bahwa Indonesia memasuki pembahasan kebijakan ekonomi 2027 dengan kondisi yang relatif kuat, tetapi tetap harus menghadapi risiko eksternal. Pemerintah melalui RAPBN 2027 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4%, dengan inflasi ditargetkan 2,5%, tingkat bunga SBN 10 tahun 6,9%, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, dan ICP sebesar US\$75 per barel. Pemerintah juga menetapkan pendapatan negara Rp3.426 triliun dan belanja negara Rp4.097 triliun, sehingga menghasilkan defisit Rp671,2 triliun atau 2,4% terhadap PDB. Target tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk tetap mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga disiplin fiskal.

Kondisi APBN 2026 juga menjadi dasar optimisme pemerintah dalam menyusun RAPBN 2027. Sampai Juli 2026, defisit APBN tercatat 0,91% terhadap PDB, sementara pendapatan negara tumbuh 21,3% secara tahunan dan belanja negara tumbuh 18,2%. Pada semester I 2026, pendapatan negara telah mencapai Rp1.459,4 triliun dan belanja negara Rp1.656 triliun, dengan keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp85,1 triliun. Pemerintah kemudian berupaya meningkatkan kapasitas fiskal melalui target penerimaan pajak 2027 sebesar Rp2.591,4 triliun, naik 12,1% dibandingkan proyeksi penerimaan pajak tahun ini. Artinya, pemerintah tidak hanya mengandalkan peningkatan belanja untuk mendorong ekonomi, tetapi juga berusaha memperkuat penerimaan negara dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran.

Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terlihat dari capaian semester I 2026 yang tumbuh 5,45%, didukung konsumsi domestik, investasi, dan kebijakan pemerintah. Presiden Prabowo bahkan meyakini pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6% dengan kebijakan yang tepat, sementara realisasi investasi semester I 2026 telah mencapai sekitar Rp1.010,6 triliun dan menciptakan sekitar 1,4 juta lapangan kerja. Namun, target pertumbuhan tersebut tetap menghadapi tantangan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, menjaga daya beli masyarakat, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memberantas korupsi, serta menciptakan kepastian bagi investor. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diikuti dengan pemerataan manfaat agar peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga melakukan efisiensi melalui restrukturisasi BUMN sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas belanja negara dan tata kelola perusahaan negara. Pemerintah menyatakan telah menghemat sekitar Rp50 triliun dari pengurangan berbagai biaya overhead setelah melakukan perampingan dan penutupan sejumlah BUMN, dengan target penghematan meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun sampai akhir 2026. Dari 1.074 entitas BUMN yang sebelumnya ada, pemerintah menyatakan 290 BUMN telah ditutup dan menargetkan jumlah BUMN tersisa paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026. Kebijakan tersebut diarahkan agar perusahaan negara yang dipertahankan benar-benar produktif dan memberikan nilai tambah kepada masyarakat, sehingga efisiensi anggaran dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih bermanfaat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.

Pada tingkat Jawa Tengah, arah pembangunan nasional tersebut terlihat diterjemahkan melalui fokus pada kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari angka, tetapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2026 turun menjadi 9,21% dari 9,48% pada Maret 2025, sementara ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,71% secara tahunan pada triwulan II 2026 atau 5,80% secara kumulatif pada semester I, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Investasi juga menunjukkan perkembangan positif, dengan realisasi sekitar Rp48,54 triliun pada semester I 2026 dan penyerapan tenaga kerja lebih dari 200 ribu orang. Untuk memperkuat manfaat ekonomi tersebut, Pemprov Jateng mendorong program Kapulaga yang mengembangkan usaha keluarga berdasarkan potensi lokal, didukung pelatihan, pendampingan, bantuan usaha, dan pemasaran digital. Selain itu, rangkaian Hari Jadi ke-81 Jawa Tengah melalui gerakan pangan murah, job fair, pameran UMKM, serta berbagai kegiatan masyarakat menunjukkan upaya pemerintah daerah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga membuka kesempatan kerja, memperkuat UMKM, meningkatkan pendapatan keluarga, dan memperluas manfaat pembangunan. Dengan demikian, keseluruhan berita dari tingkat internasional, nasional, hingga Jawa Tengah memperlihatkan satu pola yang saling berkaitan, yaitu perekonomian masih menghadapi ketidakpastian global yang tinggi, tetapi pemerintah dan masyarakat berusaha mempertahankan pertumbuhan melalui penguatan konsumsi, investasi, perdagangan, efisiensi fiskal, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ringkasan

- Perekonomian Malaysia menunjukkan kinerja yang cukup kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ekonomi Malaysia tumbuh 6% pada kuartal II 2026, lebih tinggi dari perkiraan awal sebesar 5,8%, yang terutama didorong oleh kuatnya ekspor terkait perkembangan kecerdasan buatan (AI), industri semikonduktor, produk elektronik dan listrik, serta permintaan domestik yang tetap stabil. Pertumbuhan tersebut membantu Malaysia meredam dampak konflik di Timur Tengah dan membuat negara tersebut tetap berpeluang menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia Tenggara.
- Kekuatan sektor ekspor dan investasi menjadi faktor penting yang menjaga perekonomian Malaysia tetap tumbuh. Selain meningkatnya ekspor semikonduktor, investasi asing yang terus masuk dan berbagai proyek baru turut menjaga aktivitas ekonomi, meskipun Malaysia masih menghadapi risiko dari ketidakpastian perdagangan global dan perlambatan ekonomi negara mitra dagang, termasuk China. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor teknologi, industri ekspor, dan permintaan domestik menjadi penopang utama pertumbuhan Malaysia ketika kondisi ekonomi dunia masih menghadapi berbagai tekanan.
- Konflik Amerika Serikat dan Iran masih menjadi sumber risiko besar bagi perekonomian dunia, terutama melalui sektor energi dan perdagangan internasional. Tekanan ekonomi terhadap Iran terus diperkuat melalui berbagai sanksi dan pembatasan perdagangan, sementara konflik juga

berpengaruh terhadap aktivitas pelayaran di kawasan strategis Timur Tengah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Selat Hormuz merupakan jalur penting bagi perdagangan minyak dan gas dunia, sehingga gangguan berkepanjangan dapat meningkatkan risiko kenaikan harga energi dan menambah tekanan inflasi di berbagai negara.

- Amerika Serikat mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan tekanan inflasi, tetapi arah kebijakan suku bunga The Fed masih menghadapi perbedaan pandangan. Inflasi harga produsen Amerika Serikat pada Juli 2026 turun menjadi 4,7% secara tahunan dari 5,5% pada Juni, sementara harga energi dan pangan juga mengalami penurunan. Namun, sebagian pejabat The Fed masih menilai bahwa tekanan inflasi belum sepenuhnya hilang dan kebijakan moneter perlu tetap hati-hati, sehingga keputusan mengenai perubahan suku bunga masih sangat bergantung pada perkembangan data inflasi dan pasar tenaga kerja berikutnya.
- Pasar tenaga kerja Amerika Serikat juga memberikan sinyal yang perlu diperhatikan karena klaim awal tunjangan pengangguran meningkat, meskipun kondisi tersebut belum menunjukkan pelemahan yang serius. Klaim awal meningkat menjadi 209.000 orang pada pekan yang berakhir 8 Agustus 2026, sedangkan klaim berkelanjutan justru menurun menjadi 1,78 juta. Karena kenaikan klaim awal dapat dipengaruhi faktor musiman, The Fed masih perlu melihat data yang lebih luas sebelum menentukan arah kebijakan moneter, sehingga kondisi ekonomi Amerika masih berada dalam tahap pemantauan antara risiko inflasi dan pelemahan pasar tenaga kerja.
- Perekonomian Eropa mulai menunjukkan perbaikan setelah mengalami pertumbuhan yang sangat terbatas pada kuartal sebelumnya. Ekonomi kawasan euro tumbuh 0,4% secara kuartalan pada kuartal II 2026, sementara Uni Eropa tumbuh 0,5%, lebih baik dibandingkan kuartal I yang hanya tumbuh 0% di kawasan euro dan 0,1% di Uni Eropa. Penyerapan tenaga kerja juga meningkat tipis sebesar 0,1%, sehingga terdapat tanda bahwa aktivitas ekonomi mulai membaik, meskipun pertumbuhannya masih moderat dan data tersebut masih dapat mengalami revisi pada rilis berikutnya.
- Di tengah perbaikan ekonomi Eropa, Prancis justru menghadapi peningkatan inflasi yang dipengaruhi oleh kenaikan harga energi dan jasa. Inflasi Prancis pada Juli 2026 meningkat menjadi 2,1% secara tahunan dari 1,8% pada Juni, dengan harga energi meningkat cukup tinggi dan harga jasa juga mengalami kenaikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga akibat energi dan aktivitas ekonomi masih menjadi tantangan bagi negara-negara Eropa, sehingga pemulihan ekonomi harus tetap diimbangi dengan upaya menjaga stabilitas harga.
- Berbagai perkembangan ekonomi global tersebut menjadi latar belakang bagi Indonesia dalam menyusun kebijakan ekonomi dan RAPBN 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6% pada 2027, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%, dengan inflasi ditargetkan tetap 2,5%. Pemerintah juga menetapkan asumsi nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, tingkat bunga SBN 10 tahun 6,9%, dan harga minyak mentah Indonesia sebesar US\$75 per barel, sehingga penyusunan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
- Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dan belanja negara sebesar Rp4.097 triliun. Dengan postur tersebut, defisit APBN ditargetkan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4% terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan target defisit APBN 2026 sebesar 2,68%. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan untuk mempertahankan disiplin fiskal, sehingga belanja negara tetap diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan perekonomian.
- Kondisi APBN 2026 yang relatif baik menjadi salah satu dasar optimisme pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi ke depan. Sampai semester I 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau 46,3% dari target, dengan pertumbuhan 21,4% secara tahunan, sementara belanja negara mencapai Rp1.656 triliun dan tumbuh 17,8%. Keseimbangan primer

juga mencatat surplus Rp85,1 triliun, sehingga pemerintah menilai pengalaman dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi global selama 2026 dapat menjadi modal dalam menjalankan desain kebijakan fiskal dan APBN 2027.

- Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan tetap memperhatikan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45% secara tahunan dan didukung oleh konsumsi domestik, investasi, serta kebijakan pemerintah. Pemerintah juga mencatat realisasi investasi yang besar dan penciptaan lapangan kerja, sementara target RAPBN 2027 diarahkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 6–6,5%, menekan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30–4,87%, serta meningkatkan penciptaan lapangan kerja formal. Dengan demikian, target pertumbuhan 6% tidak hanya diarahkan pada peningkatan angka PDB, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Perkembangan ekonomi nasional tersebut juga terlihat di Jawa Tengah yang menunjukkan ketahanan ekonomi cukup baik meskipun menghadapi keterbatasan fiskal dan ketidakpastian geopolitik. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya dinilai berdasarkan angka, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kemiskinan Jawa Tengah turun dari 9,48% pada Maret 2025 menjadi 9,21% pada Maret 2026, sedangkan ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,71% secara tahunan pada triwulan II 2026 atau 5,80% secara kumulatif pada semester I 2026.
- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tersebut berjalan bersamaan dengan peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja. Sepanjang 2025, investasi Jawa Tengah mencapai sekitar Rp110 triliun dengan penyerapan 257 ribu tenaga kerja, sedangkan sampai semester I 2026 investasi telah mencapai sekitar Rp48,54 triliun dengan penyerapan lebih dari 200 ribu tenaga kerja. Capaian tersebut menunjukkan bahwa investasi masih menjadi salah satu penggerak penting ekonomi daerah, sehingga pemerintah daerah perlu terus menjaga iklim investasi dan memastikan investasi yang masuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
- Penguatan ekonomi masyarakat Jawa Tengah juga dilakukan melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal, terutama melalui program Kapulaga yang dikembangkan oleh TP PKK Jawa Tengah. Program ini diarahkan untuk mengembangkan potensi setiap daerah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga, dengan tahapan mulai dari asesmen, pembentukan kelompok usaha, pelatihan dan bantuan usaha, hingga pendampingan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak hanya mengandalkan investasi besar, tetapi juga berusaha memperkuat UMKM dan usaha keluarga yang memanfaatkan potensi lokal di masing-masing wilayah.
- Pengembangan UMKM di Jawa Tengah kemudian diarahkan untuk semakin memanfaatkan pemasaran digital agar produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Pemerintah daerah menilai kualitas produk UMKM Jawa Tengah tidak kalah dengan daerah lain, tetapi salah satu kendalanya adalah keterbatasan akses terhadap pasar. Karena itu, kader dan kelompok usaha didorong menguasai pemasaran digital, termasuk melalui live shopping, yang telah menunjukkan hasil positif dalam pendampingan UMKM di daerah lain. Dengan penguatan produksi, pelatihan, pendampingan, dan pemasaran tersebut, potensi lokal diharapkan tidak hanya menjadi produk unggulan daerah, tetapi berkembang menjadi usaha yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga dan masyarakat.

Implikasi

- Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang mencapai 6% menunjukkan bahwa sektor teknologi, semikonduktor, ekspor, dan konsumsi masyarakat masih mampu mendorong ekonomi di tengah kondisi dunia yang tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa negara yang memiliki

industri kuat dan mampu mengikuti perkembangan teknologi memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan pertumbuhan ekonominya.

- Meningkatnya permintaan semikonduktor karena perkembangan AI memberikan keuntungan bagi Malaysia. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri teknologi semakin penting bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga negara perlu meningkatkan kemampuan industri dan tenaga kerja agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan bersaing dengan negara lain.
- Konflik Amerika Serikat dan Iran dapat memberikan dampak kepada ekonomi dunia, terutama melalui harga minyak dan gas. Jika konflik mengganggu jalur perdagangan seperti Selat Hormuz, pasokan energi dunia dapat terganggu dan harga minyak bisa naik. Kenaikan harga energi kemudian dapat meningkatkan biaya transportasi, produksi, dan harga barang di berbagai negara.
- Turunnya inflasi di Amerika Serikat memberikan peluang bagi The Fed untuk mempertimbangkan perubahan kebijakan suku bunga. Namun, karena masih ada kekhawatiran terhadap inflasi, The Fed harus melihat perkembangan ekonomi lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Perubahan suku bunga Amerika Serikat juga dapat memengaruhi nilai tukar, investasi, dan pasar keuangan negara lain.
- Kenaikan jumlah masyarakat Amerika Serikat yang mengajukan tunjangan pengangguran menunjukkan bahwa kondisi pasar kerja mulai perlu diperhatikan. Meskipun kenaikan tersebut belum menunjukkan masalah besar, pemerintah dan bank sentral tetap perlu memantau perkembangan tenaga kerja agar kebijakan ekonomi yang dibuat tetap sesuai dengan kondisi masyarakat.
- Pertumbuhan ekonomi Eropa yang mulai membaik menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan setelah sebelumnya mengalami pertumbuhan yang sangat rendah. Namun, pertumbuhan tersebut masih kecil sehingga Eropa tetap perlu menjaga aktivitas ekonomi dan lapangan kerja. Kondisi ini juga harus diikuti dengan pengendalian inflasi agar pemulihan ekonomi tidak terganggu.
- Naiknya inflasi di Prancis karena harga energi dan jasa menunjukkan bahwa kenaikan harga masih menjadi masalah di Eropa. Jika harga energi terus naik, biaya produksi dan transportasi juga dapat meningkat, sehingga harga barang dan jasa ikut naik. Karena itu, pemerintah perlu menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa membuat inflasi semakin tinggi.
- Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6% pada 2027 menunjukkan bahwa pemerintah cukup optimis terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Target tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi semester I 2026 sebesar 5,45% yang berasal dari konsumsi masyarakat, investasi, dan kebijakan pemerintah. Namun, agar target 6% tercapai, pemerintah perlu memastikan investasi dan belanja negara benar-benar menghasilkan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja.
- RAPBN 2027 menunjukkan bahwa pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi tetap menjaga keuangan negara. Belanja negara tetap besar untuk membantu masyarakat dan menggerakkan ekonomi, sementara defisit dijaga pada 2,4% dari PDB. Artinya, pemerintah harus menggunakan anggaran dengan hati-hati dan memastikan belanja lebih banyak digunakan untuk program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
- Target penerimaan pajak yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan penerimaan negara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperbaiki pengawasan dan pelayanan pajak serta meningkatkan aktivitas ekonomi. Jika penerimaan negara meningkat, pemerintah akan memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan program untuk masyarakat.
- Penghematan dari penutupan dan perampangan BUMN menunjukkan bahwa pemerintah ingin membuat perusahaan negara lebih efisien. BUMN yang masih dipertahankan diharapkan dapat bekerja lebih baik dan menghasilkan manfaat yang lebih besar. Penghematan anggaran juga dapat digunakan untuk kebutuhan lain seperti pelayanan publik dan pembangunan.

- Besarnya investasi di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi tempat yang menarik bagi investor. Investasi tersebut juga membantu membuka banyak lapangan kerja. Karena itu, pemerintah perlu terus menjaga kemudahan usaha, kepastian aturan, dan iklim investasi agar investasi tetap masuk dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
- Target penurunan kemiskinan dan pengangguran menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan lebih berarti jika mampu meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, dan mengurangi jumlah masyarakat miskin. Karena itu, program pemerintah perlu diarahkan agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat.
- Pembaruan data ekonomi melalui Sensus Ekonomi 2026 penting untuk membantu pemerintah membuat kebijakan yang lebih tepat. Data yang lebih baru dapat memberikan gambaran mengenai kondisi usaha dan kegiatan ekonomi yang sebenarnya. Dengan data tersebut, pemerintah dapat menyusun program pembangunan dan anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Turunnya angka kemiskinan Jawa Tengah dari 9,48% menjadi 9,21% menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat mulai membaik. Namun, jumlah masyarakat miskin masih cukup besar sehingga program pengentasan kemiskinan tetap harus dilanjutkan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,71% menunjukkan bahwa ekonomi daerah masih cukup kuat. Kondisi ini dapat menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan investasi, konsumsi masyarakat, dan kegiatan usaha. Namun, pemerintah tetap perlu berhati-hati karena kondisi ekonomi global masih tidak pasti.
- Investasi yang masuk ke Jawa Tengah memberikan dampak positif karena dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Karena itu, pemerintah daerah perlu menjaga agar investor tetap tertarik menanamkan modal di Jawa Tengah. Selain itu, investasi juga perlu dihubungkan dengan usaha masyarakat lokal agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
- Program Kapulaga dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha berdasarkan potensi yang ada di daerah masing-masing. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga membentuk kelompok usaha, memberikan bantuan, dan melakukan pendampingan. Dengan cara tersebut, usaha masyarakat diharapkan dapat berkembang dan memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga.
- Penggunaan pemasaran digital dapat membantu UMKM Jawa Tengah menjangkau lebih banyak pembeli. Produk lokal yang sebelumnya hanya dijual di sekitar daerahnya dapat dipasarkan melalui internet dan media digital. Jika pemasaran semakin luas, peluang penjualan dan pendapatan UMKM juga dapat meningkat.

Berita Sabtu, 15 Agustus

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi pada 15 Agustus 2026 menunjukkan bahwa kondisi perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian yang cukup tinggi, terutama akibat persoalan perdagangan internasional dan kebijakan tarif antarnegara. Salah satu gambaran utamanya terlihat dari hubungan dagang Kanada dan Amerika Serikat yang masih belum mencapai kesepakatan menjelang batas waktu pemberlakuan tarif baru AS sebesar 50% pada 19 Agustus 2026. Kanada masih berupaya melakukan negosiasi intensif untuk mencegah tarif tersebut diberlakukan, tetapi sejumlah persoalan penting seperti tarif kendaraan, kuota produk susu, produk minuman beralkohol, serta tarif baja dan aluminium masih

menjadi hambatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketegangan perdagangan antara negara besar dapat memberikan tekanan terhadap kegiatan ekspor-impor dan perekonomian negara yang terlibat.

Ketidakpastian perdagangan global tersebut menjadi gambaran bahwa perekonomian dunia pada 2027 masih akan menghadapi berbagai risiko, sehingga setiap negara perlu memiliki kebijakan yang mampu menjaga ketahanan ekonominya. Bagi Indonesia, kondisi global tersebut menjadi perhatian karena perubahan perdagangan internasional dapat memengaruhi investasi, ekspor, harga komoditas, dan kegiatan usaha dalam negeri. Pemerintah Indonesia menilai pengalaman menghadapi berbagai guncangan ekonomi selama 2026 dapat menjadi modal untuk menghadapi kondisi 2027. Pemerintah juga melihat bahwa meskipun ekonomi global masih menghadapi risiko struktural dan siklikal, perekonomian Indonesia tetap memiliki ketahanan karena pada semester I 2026 mampu tumbuh 5,45% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut terutama didukung konsumsi domestik, investasi, dan kebijakan pemerintah.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah mulai menyiapkan arah kebijakan ekonomi dan fiskal untuk 2027 dengan tujuan menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. RAPBN 2027 mengusung tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” dan diarahkan melalui delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional. Pemerintah juga berusaha menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara, efisiensi belanja, serta pembiayaan yang lebih inovatif dan hati-hati. Arah kebijakan ini menjadi penting karena pemerintah tidak hanya ingin mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan APBN mampu menjadi penyangga apabila terjadi tekanan dari ekonomi global.

Optimisme terhadap perekonomian Indonesia juga terlihat dari target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 6% pada 2027. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4% dan didukung oleh kinerja ekonomi pada semester pertama 2026 yang mencapai 5,45%, setelah pertumbuhan kuartal I sebesar 5,61%. Selain itu, realisasi investasi pada semester I 2026 telah mencapai sekitar Rp1.010 triliun dan disebut mampu menciptakan sekitar 1,4 juta lapangan kerja. Capaian tersebut menunjukkan bahwa investasi masih menjadi salah satu sumber penting pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Namun, untuk mencapai target 6%, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa investasi, konsumsi, dan kegiatan produksi dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pencapaian target pertumbuhan tersebut harus diikuti dengan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Pemerintah menetapkan sasaran inflasi 2027 sebesar 2,5%, sama seperti target pada APBN 2026. Target ini penting karena inflasi yang terkendali dapat membantu menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan kepastian bagi dunia usaha. Pada Juli 2026, inflasi tahunan memang telah turun menjadi 2,88% dari 3,34% pada Juni, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan 2,37% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Artinya, tekanan inflasi mulai mereda, tetapi pemerintah tetap perlu menjaga kestabilan harga karena perubahan harga pangan dan kebutuhan pokok dapat langsung memengaruhi daya beli masyarakat.

Persoalan daya beli menjadi semakin penting karena terdapat tanda-tanda bahwa momentum konsumsi masyarakat mulai melemah pada semester II 2026. Pertumbuhan ekonomi kuartal II tercatat 5,29%, lebih rendah dibandingkan 5,61% pada kuartal I. Indeks Keyakinan Konsumen juga turun dari 117,8 pada Juni menjadi 116,8 pada Juli, sementara penjualan eceran secara tahunan masih mengalami kontraksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih cukup optimistis karena indeks keyakinan tetap berada di atas 100, tetapi mulai lebih berhati-hati dalam melakukan pengeluaran. Pelemahan tersebut juga terlihat setelah berakhirnya momentum Ramadan, Idulfitri, dan libur sekolah yang sebelumnya memberikan dorongan besar terhadap konsumsi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga pendapatan dan kepastian pekerjaan agar masyarakat tetap memiliki kemampuan dan keyakinan untuk berbelanja.

Meski konsumsi menghadapi tantangan, terdapat perkembangan positif dari sektor manufaktur yang kembali masuk ke zona ekspansif pada Juli 2026. PMI Indonesia meningkat dari 46,9 pada Juni menjadi 50,2 pada Juli, yang menunjukkan mulai adanya perbaikan aktivitas produksi dan pesanan baru. Optimisme pelaku industri terhadap produksi dalam 12 bulan ke depan juga meningkat. Namun, kondisi tersebut belum dapat disebut sebagai pemulihan yang kuat karena PMI masih sangat dekat dengan batas 50 dan kenaikan harga bahan baku masih membatasi ekspansi. Karena itu, pemerintah perlu memastikan peningkatan aktivitas manufaktur dapat berlangsung secara konsisten dan tidak hanya menghasilkan kenaikan produksi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat daya beli masyarakat.

Dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan harga pangan juga menunjukkan kondisi yang masih berfluktuasi. Pada 15 Agustus 2026, sejumlah komoditas mengalami kenaikan, terutama cabai rawit merah yang mencapai sekitar Rp62.650 per kilogram, cabai rawit hijau Rp55.350 per kilogram, dan daging ayam ras sekitar Rp41.350 per kilogram. Harga beras medium I dan medium II juga mengalami kenaikan menjadi masing-masing sekitar Rp16.500 dan Rp16.300 per kilogram. Namun, beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, daging sapi, telur, gula lokal, dan beberapa jenis minyak goreng justru mengalami penurunan. Pergerakan harga yang berbeda-beda ini menunjukkan bahwa stabilitas pangan tetap perlu dijaga karena kenaikan harga bahan pangan tertentu dapat meningkatkan beban rumah tangga dan pada akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat.

Dalam sektor pangan, Indonesia juga menunjukkan posisi yang cukup kuat dengan mulai melakukan ekspor beras ke Malaysia sebanyak 200.000 ton. Pemerintah memastikan ekspor tersebut dilakukan setelah memperhitungkan produksi, stok Bulog, beras yang berada di masyarakat, serta kebutuhan nasional. Produksi beras hingga Oktober diperkirakan sekitar 30 juta ton, sedangkan ketersediaan sekitar 26 juta ton dinilai mampu memenuhi kebutuhan sekitar 10 bulan berdasarkan tingkat konsumsi masyarakat sekitar 2,5–2,6 juta ton per bulan. Stok Bulog sendiri disebut mencapai sekitar 5,25–5,26 juta ton. Dengan kondisi tersebut, ekspor dinilai masih dapat dilakukan tanpa mengganggu kebutuhan domestik. Bahkan, Indonesia juga membuka kemungkinan ekspor ke negara lain seperti Singapura, tetapi tetap dengan prinsip bahwa kebutuhan nasional harus menjadi prioritas utama, termasuk untuk menghadapi risiko El Nino dan kebutuhan bantuan pangan.

Selain sektor pangan, perkembangan investasi juga menunjukkan adanya peluang positif bagi perekonomian Indonesia melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hingga 7 Agustus 2026, komitmen realisasi investasi swasta di IKN telah mencapai Rp74,54 triliun dari 67 investor dalam dan luar negeri. Investasi tersebut mencakup pembangunan apartemen, fasilitas pelatihan, fasilitas MRO, kawasan hunian, restoran, pusat hiburan, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Selain investasi swasta, nilai proyek melalui skema KPBU juga mencapai Rp134,22 triliun. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa IKN mulai membentuk ekosistem ekonomi yang tidak hanya berisi gedung pemerintahan, tetapi juga hunian, fasilitas bisnis, transportasi, pendidikan, kuliner, hiburan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, investasi IKN diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan fisik, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi dan lapangan kerja.

Memasuki tingkat daerah, Jawa Tengah menunjukkan perkembangan ekonomi yang cukup kuat meskipun perekonomian global masih menghadapi tekanan geopolitik dan ketidakpastian perdagangan. Pada semester I 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,80% secara kumulatif, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan tersebut juga diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 3,29 juta orang atau 9,21% pada Maret 2026, berkurang dibandingkan September 2025 maupun Maret 2025. Investasi Jawa Tengah pada semester I 2026 juga mencapai Rp48,54 triliun dan mampu menyerap 213.217 tenaga kerja melalui 55.989 proyek. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mulai memberikan dampak terhadap investasi, kesempatan kerja, dan pengurangan kemiskinan.

Untuk mempertahankan perkembangan tersebut, Jawa Tengah juga berusaha memperkuat infrastruktur logistik melalui rencana pembangunan dry port di Kawasan Industri Terpadu Batang dan Weleri, Kendal. Kebijakan ini dilakukan karena sekitar 70% kontainer dari Jawa Tengah masih banyak dikirim melalui Jakarta dan Surabaya, sementara pemanfaatan Pelabuhan Tanjung Emas dinilai belum maksimal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan dry port dapat selesai dalam waktu dua tahun, dengan lokasi di Batang yang telah memasuki tahap studi kelayakan dan persiapan konsultan perencanaan. Penguatan logistik ini diharapkan dapat memperlancar distribusi barang, meningkatkan efisiensi kawasan industri, serta mendukung kegiatan investasi dan ekspor di Jawa Tengah. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dari upaya memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Pada akhirnya, rangkaian berita tersebut menunjukkan bahwa perekonomian dari tingkat internasional, nasional hingga Jawa Tengah sama-sama menghadapi tantangan sekaligus memiliki peluang untuk berkembang. Di tingkat internasional, ketegangan perdagangan Kanada-AS memperlihatkan besarnya risiko dari kebijakan tarif dan ketidakpastian perdagangan global. Di tingkat Indonesia, pemerintah berusaha menjaga pertumbuhan melalui investasi, penguatan fiskal, stabilitas harga, peningkatan produksi pangan, dan pengembangan IKN, tetapi masih harus menghadapi tantangan daya beli, penerimaan pajak, biaya usaha, serta ketidakpastian global. Sementara itu, Jawa Tengah memperlihatkan daya tahan ekonomi melalui pertumbuhan 5,80%, peningkatan investasi, penurunan kemiskinan, serta penguatan infrastruktur logistik. Namun, keberhasilan tersebut tetap membutuhkan pengelolaan anggaran yang hati-hati, seperti yang terlihat di Kota Semarang yang harus melakukan rasionalisasi belanja karena pendapatan daerah belum mencapai target dan transfer dari pemerintah pusat berkurang. Oleh karena itu, keseluruhan berita menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ke depan tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi harus didukung stabilitas harga, daya beli yang kuat, investasi produktif, kepastian regulasi, efisiensi biaya, infrastruktur yang baik, serta kolaborasi pemerintah dan dunia usaha agar pertumbuhan benar-benar menghasilkan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ringkasan

- Kanada dan Amerika Serikat masih belum mencapai kesepakatan perdagangan menjelang batas waktu pemberlakuan tarif baru AS sebesar 50% pada 19 Agustus 2026. Menteri Kanada yang menangani hubungan perdagangan dengan AS, Dominic LeBlanc, menyebut posisi kedua negara masih cukup jauh untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat disetujui Perdana Menteri Kanada. Negosiasi terus dilakukan secara intensif di Washington, termasuk melalui pertemuan antara pejabat perdagangan kedua negara.
- Tarif 50% AS berpotensi memberikan tekanan besar terhadap perdagangan Kanada karena akan dikenakan terhadap barang Kanada senilai hampir US\$20 miliar atau sekitar 5,2% dari total ekspor Kanada ke AS. Tarif tersebut juga mencakup produk yang sebelumnya memenuhi syarat memperoleh perlakuan khusus berdasarkan USMCA. Karena itu, Kanada berusaha mencapai kesepakatan sementara untuk menyelesaikan beberapa tarif yang sudah berlaku sekaligus mencegah tarif baru diberlakukan.
- Perbedaan kepentingan masih menjadi hambatan utama dalam negosiasi Kanada-AS, terutama terkait tarif kendaraan bermotor AS yang diberlakukan Kanada, pembagian kuota produk susu, serta keputusan sejumlah provinsi Kanada yang menolak menyimpan produk minuman beralkohol dari AS. Sebaliknya, Kanada meminta AS menurunkan tarif terhadap produk baja dan aluminium Kanada. Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, kedua negara menghadapi tekanan untuk segera menemukan titik temu agar hubungan perdagangan dan perekonomian Kanada tidak semakin tertekan.
- Indonesia resmi mengekspor 200.000 ton beras ke Malaysia setelah pemerintah memastikan kebutuhan beras dalam negeri tetap aman. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman

menjelaskan bahwa keputusan ekspor dilakukan berdasarkan perhitungan produksi dan ketersediaan beras secara menyeluruh. Produksi beras hingga Oktober diperkirakan mencapai sekitar 30 juta ton, termasuk dari tanaman yang sudah berada di lahan dan akan memasuki masa panen.

- Ketersediaan beras nasional dinilai masih mencukupi meskipun ekspor dilakukan, karena pemerintah memperhitungkan produksi yang akan dipanen, stok Bulog, serta beras yang berada di masyarakat dan sektor hotel, restoran, dan kafe. Kebutuhan beras masyarakat diperkirakan sekitar 2,5–2,6 juta ton per bulan, sedangkan ketersediaan sekitar 25–26 juta ton secara matematis diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan sekitar 10 bulan. Stok Bulog sendiri mencapai sekitar 5,25–5,26 juta ton sehingga pemerintah menilai ekspor hingga 200.000 ton masih dapat dilakukan tanpa mengganggu kebutuhan nasional.
- Pemerintah juga membuka peluang ekspor beras ke negara lain, termasuk Singapura, tetapi tetap menempatkan kebutuhan dalam negeri sebagai prioritas utama. Bulog masih melakukan peninjauan komunikasi dengan pihak Singapura dan akan mempertimbangkan kondisi persediaan nasional sebelum mengambil keputusan. Prinsip tersebut juga diterapkan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman, termasuk dalam menghadapi kemungkinan El Nino dan kebutuhan bantuan pangan.
- Investasi swasta di IKN terus menunjukkan perkembangan positif dengan komitmen investasi mencapai Rp74,54 triliun hingga 7 Agustus 2026 dari 67 investor dalam dan luar negeri. Investasi tersebut menjadi salah satu dari empat skema pembiayaan pembangunan IKN bersama APBN, KPBU, dan hibah. Beberapa proyek yang mulai dikembangkan antara lain empat tower apartemen dari investor asal China senilai sekitar Rp1,25 triliun, investasi dari Korea Selatan sekitar Rp2,5 triliun, serta rencana Lion Group membangun pusat pelatihan dan fasilitas MRO di sekitar Bandara IKN.
- Perkembangan investasi IKN juga mulai membentuk ekosistem perkotaan yang lebih lengkap, tidak hanya berupa gedung pemerintahan. Sejumlah proyek properti, restoran, hiburan, kuliner, dan fasilitas lainnya mulai disiapkan oleh investor, sementara nilai proyek melalui skema KPBU telah mencapai Rp134,22 triliun. OIKN menilai bertambahnya investor menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di IKN mulai terbentuk secara bertahap dan diharapkan dapat menciptakan berbagai kegiatan usaha serta lapangan kerja.
- Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027, dunia usaha masih menghadapi empat tantangan utama, yaitu daya beli masyarakat, akses pembiayaan, kepastian regulasi, dan biaya menjalankan usaha. HIPMI menilai daya beli penting karena konsumsi masyarakat menjadi salah satu sumber permintaan bagi perusahaan, sedangkan pembiayaan dengan biaya yang kompetitif dibutuhkan agar pengusaha dapat melakukan investasi dan memperluas usaha. Di sisi lain, kepastian aturan dan efisiensi biaya logistik, energi, tenaga kerja, perizinan, serta pembiayaan juga diperlukan agar dunia usaha lebih berani melakukan ekspansi.
- HIPMI juga mendorong agar investasi yang masuk memberikan manfaat lebih besar bagi pengusaha lokal, terutama melalui keterlibatan pengusaha daerah sebagai pemasok dan vendor. Dengan demikian, investasi tidak hanya menghasilkan proyek baru, tetapi juga memberikan efek berganda kepada perekonomian nasional. Kemudahan pembiayaan produktif dan dukungan terhadap daya beli, regulasi, serta biaya usaha diharapkan dapat membantu perusahaan memperluas bisnis sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 lebih memungkinkan untuk dicapai.
- Pemerintah memperkirakan ekonomi global pada 2027 masih penuh ketidakpastian, sehingga pengalaman Indonesia menghadapi berbagai tekanan eksternal sepanjang 2026 akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan ekonomi. Pemerintah menilai ekonomi Indonesia tetap memiliki ketahanan karena pada semester I 2026 tumbuh 5,45%, yang ditopang oleh konsumsi domestik, investasi, dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan fiskal 2027 diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong

pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat melalui APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan.

- Pemerintah menetapkan target inflasi 2027 sebesar 2,5% untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Target tersebut sama dengan sasaran inflasi pada APBN 2026 dan berada di tengah kisaran 1,5–3,5% yang disepakati sebagai indikator asumsi dasar ekonomi makro. Sementara itu, inflasi Juli 2026 tercatat 2,88% secara tahunan, turun dari 3,34% pada Juni, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan 2,37% pada Juli tahun sebelumnya.
- Target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 ditetapkan sebesar 6%, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4%. Pemerintah optimistis target tersebut dapat dicapai karena ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tumbuh 5,61% dan semester I tumbuh 5,45%, sementara realisasi investasi semester I mencapai sekitar Rp1.010 triliun dan menciptakan sekitar 1,4 juta lapangan kerja. Capaian tersebut menjadi salah satu dasar optimisme pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan hingga akhir 2026 dan memasuki 2027.
- Peningkatan pendapatan negara pada 2027 menjadi salah satu tantangan penting, karena pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dengan penerimaan pajak yang cukup tinggi. Pemerintah mengandalkan reformasi administrasi perpajakan, Coretax, perluasan basis pajak, digitalisasi bea cukai, serta optimalisasi sumber daya alam untuk meningkatkan penerimaan. Namun, ekonom menilai target tersebut cukup tinggi dan membutuhkan reformasi struktural karena sektor informal dan ekonomi digital belum sepenuhnya tergarap dalam basis pajak. Oleh sebab itu, peningkatan penerimaan perlu dilakukan melalui perbaikan sistem dan perluasan basis pajak tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap konsumsi dan investasi.
- Perekonomian Indonesia pada semester II 2026 menghadapi tantangan dari sisi daya beli dan konsumsi masyarakat, meskipun pertumbuhan ekonomi masih berada pada tingkat positif. Pertumbuhan PDB kuartal II sebesar 5,29% mengalami perlambatan dibandingkan kuartal I sebesar 5,61%, sementara Indeks Keyakinan Konsumen Juli turun menjadi 116,8 dari 117,8 pada Juni. Penjualan eceran juga mengalami kontraksi secara tahunan, menunjukkan bahwa masyarakat mulai lebih berhati-hati dalam melakukan pengeluaran setelah berakhirnya dorongan musiman Ramadan, Idulfitri, dan libur sekolah.
- Di tengah pelemahan konsumsi, sektor manufaktur mulai menunjukkan tanda perbaikan, karena PMI Indonesia pada Juli 2026 meningkat menjadi 50,2 dari 46,9 pada Juni dan kembali masuk zona ekspansif. Peningkatan tersebut didukung oleh volume produksi dan stabilnya pesanan baru, serta meningkatnya optimisme terhadap prospek produksi. Namun, kondisi tersebut masih perlu diperkuat karena PMI hanya sedikit berada di atas batas 50 dan kenaikan harga bahan baku masih menjadi hambatan. Pemerintah perlu memastikan pemulihan manufaktur berlangsung konsisten agar dapat meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, menaikkan pendapatan, dan pada akhirnya memperkuat daya beli masyarakat.
- Harga pangan nasional pada akhir pekan 15 Agustus 2026 bergerak fluktuatif, dengan sejumlah komoditas mengalami kenaikan sementara komoditas lainnya turun. Cabai rawit merah menjadi salah satu komoditas dengan kenaikan terbesar hingga sekitar Rp62.650 per kilogram, sedangkan cabai rawit hijau mencapai Rp55.350 per kilogram dan daging ayam ras sekitar Rp41.350 per kilogram. Harga beras medium juga meningkat, sementara bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, daging sapi, telur, gula lokal, dan beberapa jenis minyak goreng mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan tetap menjadi perhatian penting karena perubahan harga kebutuhan pokok dapat memengaruhi pengeluaran dan daya beli masyarakat.
- Jawa Tengah menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup kuat di tengah tekanan ekonomi global, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80% secara kumulatif pada semester I 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan tersebut juga disertai

penurunan kemiskinan, dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 3,29 juta orang atau 9,21% dari total penduduk. Angka tersebut menurun 59.390 orang dibandingkan September 2025 dan berkurang 81.250 orang dibandingkan Maret 2025, sehingga pertumbuhan ekonomi mulai terlihat memberikan dampak terhadap kondisi sosial masyarakat.

- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah juga didukung oleh investasi yang terus meningkat dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pada semester I 2026, realisasi investasi mencapai Rp48,54 triliun melalui 55.989 proyek dan menyerap 213.217 tenaga kerja. Investasi tersebut berasal dari PMA sebesar Rp25,92 triliun atau 53,40% dan PMDN sebesar Rp22,62 triliun atau 46,60%. Realisasi investasi pada triwulan II juga meningkat 10,88% dibandingkan triwulan I, menunjukkan bahwa minat investasi di Jawa Tengah tetap tumbuh meskipun kondisi geopolitik dan ekonomi global masih penuh ketidakpastian.
- Untuk memperkuat investasi dan aktivitas industri, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pengembangan kawasan industri serta pembangunan dry port sebagai bagian dari penguatan sistem logistik. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melakukan studi komparatif ke Cikarang Dry Port untuk melihat bagaimana pelabuhan darat dapat mendukung pergerakan logistik kawasan industri. Rencana pembangunan dry port diarahkan di Kawasan Industri Terpadu Batang dan Weleri, Kendal, dengan masing-masing gambaran lokasi sekitar 50 hektare. Untuk dry port di Batang, kerja sama antara PT KAI, Pelindo, KITB, SPJT, dan BUMD Batang telah dituangkan dalam MoU dan saat ini memasuki tahap studi kelayakan serta pemilihan konsultan. Pemerintah menargetkan pembangunan tersebut dapat selesai dalam dua tahun.
- Penguatan ekonomi Jawa Tengah juga dilakukan melalui pendekatan pemerintahan kolaboratif, karena pemerintah daerah menilai pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri oleh gubernur atau pemerintah provinsi. Pemerintah mengajak bupati dan wali kota, dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat, serta media untuk bekerja sama dalam mendorong pembangunan dan investasi. Semangat tersebut tercermin dalam tema Hari Jadi ke-81 Jawa Tengah, “Gumregut Nyawiji”, yang menekankan nilai kolaborasi dan gotong royong. Dengan kerja sama berbagai pihak, pertumbuhan ekonomi dan investasi diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Jawa Tengah.
- Namun, tidak semua daerah di Jawa Tengah memiliki ruang fiskal yang sama kuat, seperti yang terlihat di Kota Semarang yang harus memperketat belanja dalam Perubahan APBD 2026. Kebijakan tersebut dilakukan karena realisasi pendapatan daerah belum mencapai target, sementara perlambatan ekonomi dan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat memberikan tekanan terhadap kondisi keuangan daerah. Realisasi PAD, terutama dari pajak dan retribusi, hingga triwulan III belum mencapai 50%, bahkan sejumlah retribusi masih berada di bawah 30%. Karena itu, Pemkot Semarang melakukan rasionalisasi terhadap belanja yang dapat ditunda, seperti perjalanan dinas, ATK, makan-minum, kendaraan dinas, perangkat elektronik, dan sejumlah proyek fisik yang belum memasuki tahap lelang.

Implikasi

- Ketegangan perdagangan antara Kanada dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa kondisi perdagangan dunia masih belum stabil. Rencana AS mengenakan tarif 50% terhadap barang dari Kanada dapat membuat biaya perdagangan menjadi lebih mahal dan menyulitkan perusahaan Kanada yang melakukan ekspor ke AS. Karena itu, Kanada terus melakukan negosiasi agar tarif tersebut tidak diberlakukan dan hubungan perdagangan kedua negara tetap berjalan dengan baik.
- Perbedaan kepentingan Kanada dan AS dapat membuat hubungan ekonomi kedua negara semakin sulit. AS masih mempermasalahkan tarif kendaraan, produk susu, dan minuman beralkohol dari AS, sedangkan Kanada meminta AS menurunkan tarif baja dan aluminium. Jika

tidak ada kesepakatan, perdagangan kedua negara dapat terganggu dan perusahaan akan lebih sulit menentukan rencana produksi, investasi, dan ekspor.

- Kondisi tersebut menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk tidak terlalu bergantung pada perdagangan dengan negara tertentu. Perubahan kebijakan perdagangan negara besar seperti AS dapat memengaruhi negara lain melalui perubahan ekspor, impor, investasi, dan harga barang. Karena itu, Indonesia perlu memperkuat pasar dalam negeri, memperluas tujuan ekspor, dan meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri agar lebih siap menghadapi perubahan ekonomi global.
- Ekspor 200.000 ton beras ke Malaysia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki produksi beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus melakukan ekspor. Pemerintah telah menghitung produksi, stok Bulog, dan kebutuhan masyarakat sebelum memutuskan ekspor. Hal ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan perdagangan dan pendapatan negara, selama kebutuhan beras masyarakat tetap aman.
- Ekspor beras tetap harus dilakukan dengan hati-hati karena harga beberapa bahan pangan masih mengalami kenaikan. Pemerintah harus memastikan jumlah beras yang tersedia tetap cukup, terutama jika terjadi El Nino atau kebutuhan bantuan pangan meningkat. Dengan demikian, ekspor tidak boleh mengurangi ketersediaan pangan untuk masyarakat dalam negeri.
- Investasi di IKN menunjukkan bahwa kawasan tersebut mulai menarik minat investor dalam dan luar negeri. Komitmen investasi yang mencapai Rp74,54 triliun dapat mendorong pembangunan apartemen, tempat tinggal, restoran, pusat pelatihan, fasilitas MRO, dan berbagai usaha lainnya. Jika investasi tersebut terus berkembang, IKN dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi baru dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
- Banyaknya investasi di IKN juga menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada uang pemerintah. Pemerintah membutuhkan peran swasta melalui investasi langsung dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Karena itu, pemerintah perlu memberikan kepastian aturan, mempercepat perizinan, dan menyediakan infrastruktur yang baik agar investor tetap tertarik dan proyek dapat segera berjalan.
- Target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 menunjukkan bahwa pemerintah ingin ekonomi Indonesia tumbuh lebih cepat. Namun, target tersebut membutuhkan kondisi usaha yang baik. Daya beli masyarakat harus tetap kuat, pembiayaan harus mudah diperoleh, aturan harus jelas, dan biaya usaha seperti logistik, energi, serta tenaga kerja harus dapat dikendalikan agar perusahaan berani mengembangkan usahanya.
- Investasi yang masuk juga perlu memberikan manfaat kepada pengusaha dan masyarakat Indonesia. Pengusaha lokal perlu diberi kesempatan untuk menjadi pemasok atau mitra dari perusahaan yang melakukan investasi. Dengan begitu, manfaat investasi tidak hanya diterima oleh investor besar, tetapi juga dapat membantu UMKM, perusahaan daerah, dan masyarakat melalui peningkatan kegiatan usaha dan lapangan kerja.
- Pemerintah perlu menjaga APBN agar tetap kuat dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang tidak pasti. Pemerintah menyiapkan RAPBN 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi 6% dan inflasi 2,5%. Untuk mencapainya, pemerintah perlu meningkatkan pendapatan negara, menggunakan anggaran secara efisien, dan tetap berhati-hati dalam menggunakan pembiayaan agar kondisi keuangan negara tetap sehat.
- Target penerimaan pajak yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah membutuhkan pendapatan yang lebih besar untuk membiayai pembangunan. Pemerintah akan memperbaiki sistem pajak melalui Coretax, memperluas wajib pajak, dan meningkatkan digitalisasi. Namun, peningkatan pajak perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak terlalu membebani masyarakat dan dunia usaha karena hal tersebut dapat mengurangi konsumsi dan investasi.
- Menurunnya keyakinan konsumen menunjukkan bahwa masyarakat mulai lebih berhati-hati dalam menggunakan uangnya. Indeks Keyakinan Konsumen turun dari 117,8 pada Juni menjadi 116,8 pada Juli, sementara penjualan eceran juga mengalami penurunan secara

tahunan. Jika kondisi ini terus terjadi, konsumsi masyarakat dapat melemah dan akhirnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi karena konsumsi merupakan salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia.

- Sektor manufaktur mulai menunjukkan perbaikan sehingga dapat membantu menguatkan ekonomi Indonesia. PMI Indonesia naik dari 46,9 pada Juni menjadi 50,2 pada Juli dan kembali masuk ke zona ekspansi. Namun, kenaikan harga bahan baku masih menjadi masalah sehingga pemerintah perlu membantu menciptakan kondisi yang membuat biaya produksi lebih terjangkau agar industri dapat terus berkembang dan membuka lapangan kerja.
- Perubahan harga pangan menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok. Harga cabai, ayam, dan beras mengalami kenaikan, sedangkan beberapa bahan pangan lainnya mengalami penurunan. Jika harga kebutuhan pokok naik terlalu tinggi, masyarakat akan mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lainnya sehingga daya beli dapat melemah. Karena itu, ketersediaan dan distribusi pangan perlu terus dijaga.
- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,80% menunjukkan bahwa ekonomi daerah masih cukup kuat. Pertumbuhan tersebut juga diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 3,29 juta orang atau 9,21%. Artinya, pertumbuhan ekonomi mulai memberikan dampak positif terhadap kondisi masyarakat. Pemerintah daerah perlu menjaga pertumbuhan tersebut agar kemiskinan dapat terus berkurang.
- Investasi menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Pada semester I 2026, investasi mencapai Rp48,54 triliun dan mampu menyerap 213.217 tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi tidak hanya membawa modal, tetapi juga dapat membuka lapangan pekerjaan. Karena itu, pemerintah daerah perlu terus menciptakan kondisi yang aman dan mudah bagi investor.
- Rencana pembangunan dry port di Batang dan Weleri, Kendal dapat membantu memperbaiki kegiatan logistik di Jawa Tengah. Saat ini sebagian besar kontainer dari Jawa Tengah masih dikirim melalui Jakarta dan Surabaya. Dengan adanya dry port, distribusi barang dari kawasan industri dapat menjadi lebih mudah dan efisien. Hal ini diharapkan dapat membantu perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing produk Jawa Tengah.
- Pembangunan kawasan industri dan infrastruktur logistik dapat membuat Jawa Tengah semakin menarik bagi investor. Jika transportasi dan distribusi barang semakin baik, perusahaan akan lebih mudah mendapatkan bahan baku dan mengirimkan hasil produksinya. Kondisi tersebut dapat mendorong masuknya investasi baru dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Jawa Tengah.
- Kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Pemerintah daerah tidak dapat menjalankan pembangunan sendiri sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dengan kerja sama yang baik, masalah investasi, tenaga kerja, infrastruktur, dan pembangunan daerah dapat ditangani dengan lebih efektif.
- Kondisi Kota Semarang menunjukkan bahwa pemerintah daerah juga harus berhati-hati dalam mengelola anggaran. Pendapatan daerah belum mencapai target dan dana transfer dari pemerintah pusat juga berkurang. Karena itu, Pemkot Semarang harus mengurangi atau menunda belanja yang belum mendesak agar tidak mengalami masalah dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Berita Minggu, 16 Agustus

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi internasional pada Minggu, 16 Agustus 2026 menunjukkan bahwa ketidakpastian kebijakan perdagangan masih memberikan pengaruh besar terhadap keputusan investasi perusahaan. Hal tersebut terlihat dari investasi perusahaan Jerman di Amerika Serikat yang pada semester I-2026 turun hampir dua pertiga menjadi sekitar €4,3 miliar, sekaligus menjadi level terendah sejak 2023. Penurunan tersebut salah satunya dipengaruhi ketidakpastian kebijakan pemerintahan Donald Trump, terutama terkait ancaman tarif impor terhadap berbagai mitra dagang Amerika Serikat. Kondisi ini membuat perusahaan Jerman lebih berhati-hati dalam menempatkan modal baru, meskipun perusahaan yang sudah beroperasi di Amerika Serikat masih tetap melakukan investasi kembali dari keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian, Amerika Serikat masih dianggap sebagai pasar yang menarik, tetapi ketidakpastian kebijakan membuat perusahaan cenderung menahan investasi baru.

Ketidakpastian investasi di Amerika Serikat tersebut kemudian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan negara besar dapat memengaruhi hubungan ekonomi dan perdagangan secara lebih luas. Di tengah kondisi tersebut, sejumlah negara di Afrika justru mulai meningkatkan penggunaan yuan China dalam perdagangan internasional dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Beberapa negara dan lembaga keuangan di Afrika mulai terhubung dengan sistem pembayaran lintas batas China atau CIPS, yang menjadi salah satu alternatif jaringan pembayaran internasional. Libya menjadi salah satu negara yang mengambil langkah tersebut setelah adanya pertemuan antara Bank Sentral Libya dan Bank Sentral China. Perkembangan ini menunjukkan semakin kuatnya hubungan ekonomi China dengan negara-negara Afrika dan semakin beragamnya pilihan sistem pembayaran dalam perdagangan internasional.

Perubahan hubungan ekonomi global tersebut menjadi bagian dari kondisi yang juga harus dihadapi Indonesia. Meskipun perekonomian dunia masih menghadapi ketidakpastian, Indonesia menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif kuat dengan pertumbuhan sebesar 5,61% pada kuartal I-2026 dan sekitar 5,45% pada semester I-2026. Pemerintah bahkan memiliki optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat apabila kebijakan yang dijalankan mampu menjaga momentum pertumbuhan. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak hanya perlu dilihat dari besarnya angka pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, menjaga daya beli, serta mengurangi kemiskinan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan yang terjadi benar-benar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Untuk menjaga pertumbuhan tersebut, investasi menjadi salah satu faktor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Pada semester I-2026, realisasi investasi mencapai sekitar Rp1.010,6 triliun dan mampu menciptakan sekitar 1,45 juta lapangan kerja langsung. Melihat perkembangan tersebut, pemerintah menargetkan investasi pada 2027 sebesar Rp2.322 triliun atau naik 13,8% dari target investasi 2026 sebesar Rp2.041 triliun. Target tersebut akan didukung melalui perbaikan iklim investasi, terutama dengan memberikan kepastian perizinan, mempercepat pembangunan proyek, dan menyelesaikan berbagai hambatan investasi di lapangan. Pemerintah juga terus mengembangkan sistem OSS dengan teknologi AI, big data, dan blockchain agar proses perizinan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Dengan perbaikan tersebut, investasi diharapkan tidak hanya masuk dalam jumlah besar, tetapi juga lebih cepat direalisasikan menjadi kegiatan ekonomi dan lapangan pekerjaan.

Namun, peningkatan investasi dan belanja untuk mendorong pertumbuhan harus tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Pemerintah dalam RAPBN 2027 menetapkan defisit sebesar Rp671,2 triliun atau sekitar 2,40% terhadap PDB sehingga masih berada di bawah batas 3%. Untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah akan menggunakan kombinasi pembiayaan utang dan

nonutang dengan tetap mempertimbangkan biaya, risiko, dan manfaat jangka panjang. Pemerintah juga akan memperdalam pasar keuangan dalam negeri, memperluas basis investor, melakukan diversifikasi penerbitan obligasi global, serta mengembangkan pembiayaan inovatif seperti KPBU dan blended finance. Pada saat yang sama, pemerintah tetap membuka kemungkinan melakukan efisiensi belanja apabila kondisi APBN membutuhkan penyesuaian. Artinya, pemerintah berusaha menjaga agar anggaran tetap dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan, tetapi kondisi fiskal juga tetap terkendali.

Kebutuhan untuk menjaga kondisi fiskal tersebut juga terlihat pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hingga 31 Juli 2026, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp606,8 triliun atau turun 12,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai Rp538,6 triliun atau 42,5% dari pagu anggaran. Untuk membantu daerah yang mengalami keterbatasan fiskal, pemerintah meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah menjadi Rp725,2 triliun, termasuk tambahan anggaran untuk penanganan bencana, dana otonomi khusus, serta membantu daerah yang kesulitan membiayai belanja pegawai dan pembayaran PPPK. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat masih perlu memberikan dukungan kepada daerah ketika kemampuan pendapatannya terbatas. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan dengan hati-hati agar belanja dapat tetap berjalan tanpa menambah tekanan terhadap kondisi fiskal.

Di tengah upaya menjaga fiskal tersebut, pemerintah juga harus menentukan prioritas penggunaan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Salah satu program yang mendapatkan alokasi besar dalam RAPBN 2027 adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan anggaran sekitar Rp240 triliun untuk 60,6 juta penerima. Anggaran pendidikan secara keseluruhan mencapai Rp820,9 triliun, sehingga alokasi MBG mencapai sekitar 29,2% dari total anggaran pendidikan. Selain MBG, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, tunjangan guru, pembangunan sekolah unggul, inovasi sekolah dan madrasah, Sekolah Rakyat, BOS, serta berbagai program pendidikan lainnya. Dengan demikian, kebijakan anggaran pendidikan diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, tetapi juga untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas generasi mendatang.

Selain pendidikan dan perlindungan sosial, pemerintah juga mulai mengubah kebijakan di sektor energi melalui pengurangan subsidi BBM dan pengembangan kendaraan listrik. Dalam RAPBN 2027, kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 20,09 juta kiloliter, turun sekitar 58,5% dibandingkan kuota 2026 yang mencapai 48,43 juta kiloliter. Menurut Menteri Keuangan, pengurangan tersebut terutama dipengaruhi oleh asumsi harga minyak mentah yang lebih rendah, tetapi kebijakan tersebut juga berjalan bersamaan dengan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Pemerintah menyiapkan insentif untuk 1 juta motor listrik produksi dalam negeri dengan harapan dapat mengurangi biaya transportasi masyarakat, mengurangi impor energi, serta membuka lapangan kerja dan sumber penghasilan baru. Dengan demikian, perubahan kebijakan subsidi energi diarahkan tidak hanya untuk mengurangi beban anggaran, tetapi juga untuk mendorong perubahan penggunaan energi dan pengembangan industri kendaraan listrik di dalam negeri.

Kebijakan investasi, pendidikan, energi, dan industri tersebut pada akhirnya berkaitan erat dengan upaya Indonesia memanfaatkan bonus demografi. Indonesia memiliki sekitar 201,06 juta penduduk usia produktif atau 69,30% dari total populasi. Jumlah tersebut menjadi modal besar bagi perekonomian, tetapi tidak secara otomatis menghasilkan keuntungan ekonomi apabila tidak diikuti dengan tersedianya pekerjaan yang berkualitas dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Karena itu, Indonesia perlu mempercepat investasi, industrialisasi, pendidikan, peningkatan keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja agar penduduk usia produktif dapat menjadi kekuatan ekonomi. Dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan, percepatan tersebut menjadi penting karena keterlambatan meningkatkan produktivitas dapat membuat Indonesia memasuki fase penuaan penduduk sebelum tingkat pendapatan dan produktivitas nasional cukup tinggi.

Untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas, pemerintah juga mendorong hilirisasi dan pemerataan investasi di berbagai wilayah Indonesia. Pada semester I-2026, investasi hilirisasi telah mencapai sekitar Rp300,1 triliun atau hampir 30% dari total investasi nasional. Hilirisasi diarahkan agar Indonesia tidak hanya mengeksport bahan mentah seperti nikel, bauksit, sawit, dan tembaga, tetapi juga mengembangkan industri pengolahan dan menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri. Pada periode yang sama, investasi di luar Jawa mencapai sekitar Rp507,8 triliun atau 50,2% dari total investasi nasional, sedikit lebih tinggi dibandingkan investasi di Jawa yang mencapai sekitar Rp502,8 triliun. Perkembangan ini menunjukkan bahwa investasi mulai bergerak lebih merata dan dapat menjadi dasar bagi perluasan industrialisasi di berbagai wilayah Indonesia.

Arah pembangunan tersebut kemudian terlihat pada upaya penguatan sektor ekonomi kreatif dan UMKM yang juga memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Di Jawa Tengah, perhatian terhadap ekonomi kreatif muncul melalui dorongan agar sektor tersebut dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Namun, terdapat perhatian terhadap kebijakan efisiensi anggaran karena dukungan pemerintah tetap dibutuhkan agar potensi ekonomi kreatif, khususnya yang banyak digerakkan generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat berkembang secara maksimal. Pada saat yang sama, pemerintah tetap menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Bahkan, hasil pemeriksaan BPK sepanjang 2025 disebut telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara hingga Rp112 triliun. Dengan demikian, tantangan pemerintah adalah menjaga efisiensi anggaran tanpa mengurangi dukungan terhadap sektor-sektor yang memiliki potensi menciptakan sumber pertumbuhan baru.

Kondisi tersebut kemudian semakin terlihat dalam kegiatan ekonomi di Jawa Tengah melalui pelaksanaan Gebyar Fest 81 yang diselenggarakan Bank Jateng pada 12–16 Agustus 2026 di 44 kantor cabang. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat UMKM, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan transaksi digital, serta memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. Salah satu kegiatan utamanya adalah akad kredit massal yang melibatkan sekitar 1.100 debitur dengan penyaluran mencapai Rp279 miliar melalui berbagai jenis pembiayaan, termasuk KUR, KUR Syariah, KPP, FLPP, dan KKB. Bank Jateng juga memberikan ruang bagi UMKM untuk memasarkan produk sekaligus memperoleh akses pembiayaan dan layanan perbankan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Jawa Tengah yang memiliki lebih dari empat juta pelaku UMKM, sehingga kemudahan mendapatkan modal menjadi salah satu faktor penting agar usaha kecil dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, dan berkembang lebih besar.

Secara keseluruhan, rangkaian berita tersebut menunjukkan hubungan yang cukup jelas antara perkembangan ekonomi internasional, kebijakan ekonomi nasional, dan aktivitas ekonomi di daerah. Ketidakpastian perdagangan global membuat negara dan perusahaan semakin berhati-hati dalam menentukan investasi, sementara perubahan penggunaan mata uang dalam perdagangan menunjukkan bahwa hubungan ekonomi dunia juga semakin beragam. Dalam kondisi tersebut, Indonesia berusaha menjaga pertumbuhan dengan meningkatkan investasi, memperkuat hilirisasi, menjaga defisit tetap terkendali, mengembangkan sumber daya manusia, mengurangi ketergantungan terhadap BBM, serta memanfaatkan bonus demografi. Kebijakan tersebut kemudian diteruskan di tingkat daerah melalui penguatan UMKM, akses pembiayaan, digitalisasi, dan pengembangan ekonomi kreatif seperti yang terlihat di Jawa Tengah. Oleh karena itu, inti dari keseluruhan berita adalah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus diperkuat, tetapi pertumbuhan tersebut harus diikuti dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, pemerataan investasi, penguatan UMKM, dan penggunaan anggaran yang tepat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Ringkasan

- Investasi perusahaan Jerman di Amerika Serikat turun cukup besar. Pada semester I-2026, investasi perusahaan Jerman di AS hanya sekitar €4,3 miliar, turun hampir dua pertiga dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi yang terendah sejak 2023. Penurunan ini terjadi karena perusahaan Jerman merasa tidak yakin dengan kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump, terutama terkait rencana tarif impor. Kondisi tersebut membuat perusahaan lebih berhati-hati dan mengurangi investasi baru di AS.
- Penurunan investasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan dapat memengaruhi keputusan perusahaan. Ketika aturan perdagangan belum pasti, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menggunakan modalnya. Meskipun demikian, perusahaan Jerman yang sudah memiliki usaha di AS masih tetap melakukan investasi dari keuntungan yang mereka dapatkan. Artinya, AS masih menjadi pasar yang penting, tetapi perusahaan tidak terlalu berani melakukan investasi baru dalam jumlah besar.
- Sementara itu, hubungan ekonomi China dengan negara-negara Afrika semakin kuat. Beberapa negara Afrika mulai menggunakan yuan China dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran. Sejumlah negara dan lembaga keuangan juga mulai terhubung dengan sistem pembayaran China atau CIPS. Libya menjadi salah satu negara yang berencana bergabung dengan sistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara Afrika mulai memiliki pilihan lain dalam melakukan transaksi internasional dan tidak hanya bergantung pada dolar AS.
- Penggunaan yuan di Afrika didukung oleh semakin besarnya perdagangan China dengan Afrika. Pada semester I-2026, perdagangan China dengan Afrika mencapai sekitar US\$203,5 miliar. Penggunaan yuan dapat membuat transaksi antara China dan Afrika menjadi lebih mudah karena tidak harus menggunakan dolar AS atau euro sebagai mata uang perantara. Namun, kondisi ini belum berarti yuan akan menggantikan dolar AS, tetapi menunjukkan bahwa sistem perdagangan dunia mulai semakin beragam.
- Di tengah kondisi ekonomi dunia yang tidak pasti, ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% pada kuartal I-2026 dan sekitar 5,45% pada semester I-2026. Pemerintah masih optimistis pertumbuhan dapat terus meningkat. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari angka pertumbuhan, tetapi juga harus mampu menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, serta mengurangi kemiskinan.
- Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus mendorong investasi. Pada semester I-2026, realisasi investasi mencapai sekitar Rp1.010,6 triliun dan menciptakan sekitar 1,45 juta lapangan kerja langsung. Pemerintah juga menargetkan investasi tahun 2027 mencapai Rp2.322 triliun, naik 13,8% dari target tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memperbaiki proses perizinan, mempercepat pembangunan proyek, dan menyelesaikan hambatan yang dihadapi investor.
- Pemerintah juga ingin agar investasi tidak hanya terkumpul di wilayah tertentu. Pada semester I-2026, investasi di luar Jawa mencapai sekitar Rp507,8 triliun, sedangkan investasi di Jawa sekitar Rp502,8 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi di luar Jawa mulai cukup besar dan pembangunan ekonomi mulai lebih tersebar. Dengan pemerataan investasi, pemerintah berharap kegiatan ekonomi dan lapangan kerja dapat berkembang di lebih banyak daerah.
- Selain meningkatkan investasi, pemerintah terus mendorong hilirisasi. Investasi untuk hilirisasi pada semester I-2026 mencapai sekitar Rp300,1 triliun atau hampir 30% dari total investasi. Hilirisasi dilakukan agar Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah seperti nikel, bauksit, sawit, dan tembaga, tetapi juga mengolahnya menjadi produk yang memiliki nilai lebih tinggi. Dengan cara ini, lebih banyak kegiatan produksi dan nilai ekonomi dapat dilakukan di dalam negeri.

- Peningkatan program pembangunan juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan defisit sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40% dari PDB, sehingga masih di bawah batas 3%. Pemerintah akan menggunakan utang dan sumber pembiayaan lainnya untuk menutup defisit, tetapi tetap berusaha mengendalikan risiko dan biaya. Pemerintah juga akan memperluas sumber penerimaan dan menggunakan pembiayaan seperti KPBU serta blended finance agar kebutuhan pembangunan tetap dapat dipenuhi.
- Masalah keuangan juga terjadi di tingkat pemerintah daerah. Sampai Juli 2026, pendapatan daerah mencapai Rp606,8 triliun, turun 12,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja daerah sudah mencapai Rp538,6 triliun. Untuk membantu daerah yang mengalami kesulitan keuangan, pemerintah meningkatkan Transfer ke Daerah menjadi Rp725,2 triliun. Dana tersebut antara lain digunakan untuk membantu pembayaran pegawai, PPPK, penanganan bencana, dan daerah yang memiliki kemampuan keuangan rendah.
- Pemerintah juga memberikan anggaran besar untuk pendidikan dan program Makan Bergizi Gratis. Anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 mencapai Rp820,9 triliun, sedangkan sekitar Rp240 triliun dialokasikan untuk program MBG bagi 60,6 juta penerima. Selain MBG, pemerintah tetap menyediakan anggaran untuk Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, tunjangan guru, pembangunan sekolah, BOS, dan berbagai program pendidikan lainnya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian pada peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.
- Pemerintah juga mulai mengurangi ketergantungan terhadap BBM dan mendorong kendaraan listrik. Kuota BBM bersubsidi pada 2027 direncanakan turun menjadi 20,09 juta kiloliter, dari 48,43 juta kiloliter pada 2026. Selain pengurangan subsidi, pemerintah juga menyiapkan insentif untuk 1 juta motor listrik produksi dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan energi impor, menekan biaya transportasi masyarakat, dan membuka lapangan kerja baru di industri kendaraan listrik.
- Berbagai kebijakan tersebut juga berkaitan dengan bonus demografi Indonesia. Penduduk usia produktif Indonesia mencapai sekitar 201,06 juta orang atau 69,30% dari jumlah penduduk. Jumlah tersebut merupakan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus diikuti dengan penyediaan lapangan kerja, pendidikan, keterampilan, dan peningkatan produktivitas. Karena itu, pemerintah perlu terus mendorong investasi dan industri agar banyak penduduk usia produktif dapat bekerja dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian.
- Pemerintah juga mendorong sektor ekonomi kreatif dan teknologi sebagai sumber pertumbuhan baru. Sektor ini dinilai memiliki potensi besar, terutama karena banyak melibatkan generasi muda. Namun, pemerintah juga harus tetap memperhatikan efisiensi anggaran agar setiap program memberikan manfaat yang jelas. Karena itu, dukungan terhadap sektor yang memiliki potensi ekonomi tetap perlu berjalan bersama dengan pengawasan dan penggunaan anggaran yang lebih hati-hati.
- Kebijakan penguatan ekonomi tersebut juga terlihat di Jawa Tengah melalui kegiatan Bank Jateng. Bank Jateng mengadakan Gebyar Fest 81 pada 12–16 Agustus 2026 di 44 kantor cabang. Kegiatan ini tidak hanya untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga bertujuan membantu UMKM, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan transaksi digital, dan memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat.
- Salah satu kegiatan utama Gebyar Fest 81 adalah pemberian kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha. Sekitar 1.100 debitur mendapatkan pembiayaan dengan total sekitar Rp279 miliar melalui KUR, KUR Syariah, KPP, FLPP, dan KKB. Bank Jateng juga memberikan kesempatan kepada UMKM untuk memasarkan produk dan mendapatkan akses pembiayaan serta layanan perbankan. Hal ini penting karena Jawa Tengah memiliki lebih dari empat juta pelaku UMKM,

sehingga kemudahan mendapatkan modal dapat membantu mereka meningkatkan produksi, memperluas pemasaran, dan mengembangkan usaha.

Implikasi

- Turunnya investasi perusahaan Jerman di Amerika Serikat menunjukkan bahwa ketidakpastian kebijakan perdagangan dapat membuat investor lebih berhati-hati. Kebijakan tarif dan perubahan aturan perdagangan membuat perusahaan harus mempertimbangkan risiko sebelum menanamkan modal baru. Jika ketidakpastian tersebut terus berlangsung, investasi baru dapat semakin tertahan dan perusahaan dapat memilih untuk mempertahankan modal yang sudah ada daripada melakukan ekspansi besar. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kepastian kebijakan menjadi salah satu hal penting untuk menjaga kepercayaan investor.
- Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan negara-negara mitra dagangnya. Perusahaan dari negara lain akan semakin memperhatikan kebijakan tarif dan aturan perdagangan AS sebelum menentukan lokasi investasi. Karena itu, negara-negara yang ingin menarik investasi perlu memberikan kepastian aturan dan kondisi usaha yang stabil agar perusahaan tetap yakin untuk menanamkan modalnya. Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pelajaran bahwa iklim investasi yang jelas dan mudah diprediksi sangat penting untuk menarik investor di tengah persaingan global.
- Meningkatnya penggunaan yuan dalam perdagangan negara-negara Afrika menunjukkan bahwa sistem perdagangan internasional mulai semakin beragam. Hubungan perdagangan China dan Afrika yang semakin besar membuat penggunaan yuan menjadi lebih banyak, sementara beberapa negara Afrika mulai terhubung dengan sistem pembayaran CIPS milik China. Kondisi ini dapat memperkuat posisi China dalam perdagangan internasional dan memberikan pilihan lain bagi negara-negara yang ingin melakukan transaksi tanpa terlalu bergantung pada dolar AS.
- Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa negara-negara semakin berusaha melakukan diversifikasi dalam hubungan ekonomi internasional. Penggunaan yuan belum berarti menggantikan dolar AS, tetapi menunjukkan bahwa negara-negara mulai memiliki lebih banyak pilihan dalam melakukan perdagangan dan pembayaran. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, perubahan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga hubungan ekonomi dengan berbagai negara agar tidak terlalu bergantung pada satu pasar, satu mata uang, atau satu sumber investasi.
- Kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian membuat Indonesia perlu menjaga kekuatan ekonomi dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di sekitar 5% menunjukkan bahwa perekonomian masih cukup kuat, tetapi pemerintah tetap perlu menjaga konsumsi masyarakat, investasi, produksi, dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi juga perlu diterjemahkan menjadi peningkatan lapangan kerja dan pendapatan agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.
- Target investasi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa investasi akan menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Target investasi 2027 sebesar Rp2.322 triliun diharapkan dapat meningkatkan kegiatan produksi dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Namun, semakin besar target investasi juga berarti pemerintah harus memastikan proses perizinan lebih cepat, aturan lebih jelas, dan hambatan di lapangan dapat segera diselesaikan. Jika proses tersebut berjalan baik, investasi tidak hanya meningkatkan jumlah modal yang masuk, tetapi juga dapat memperluas kesempatan kerja dan kegiatan usaha masyarakat.
- Peningkatan investasi di luar Jawa dapat membantu pemerataan pembangunan nasional. Investasi di luar Jawa yang sudah mencapai sekitar Rp507,8 triliun menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi mulai berkembang di berbagai wilayah. Jika kondisi tersebut terus berlanjut, daerah di luar Jawa memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan lapangan kerja,

pembangunan industri, dan peningkatan aktivitas ekonomi. Hal ini juga dapat mengurangi ketergantungan pembangunan terhadap Pulau Jawa dan membantu mengurangi kesenjangan antarwilayah.

- Investasi hilirisasi yang semakin besar dapat meningkatkan nilai tambah hasil sumber daya alam Indonesia. Dengan mengolah nikel, bauksit, sawit, tembaga, dan komoditas lainnya di dalam negeri, Indonesia dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi daripada hanya menjual bahan mentah. Implikasinya, kegiatan industri di dalam negeri dapat semakin berkembang, kebutuhan tenaga kerja dapat meningkat, dan manfaat ekonomi dari sumber daya alam dapat lebih banyak dinikmati di Indonesia.
- Namun, peningkatan program dan investasi juga membuat pemerintah harus semakin hati-hati dalam mengelola APBN. Defisit RAPBN 2027 yang ditargetkan 2,40% terhadap PDB memang masih berada di bawah batas 3%, tetapi kebutuhan pembiayaan pembangunan tetap besar. Karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara membiayai program prioritas dengan menjaga utang dan risiko fiskal tetap terkendali. Penggunaan anggaran juga perlu diarahkan pada program yang benar-benar memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat.
- Penurunan pendapatan daerah menunjukkan bahwa sebagian daerah masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Pendapatan daerah yang turun menjadi Rp606,8 triliun sementara belanja terus berjalan dapat membuat beberapa daerah mengalami tekanan dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya. Tambahan Transfer ke Daerah menjadi Rp725,2 triliun dapat membantu daerah yang mengalami kesulitan, terutama untuk membayar pegawai dan PPPK. Namun, dalam jangka panjang daerah juga perlu meningkatkan kemampuan memperoleh pendapatan sendiri agar tidak terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
- Besarnya anggaran untuk MBG menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian besar terhadap kebutuhan dasar dan kualitas sumber daya manusia. Alokasi sekitar Rp240 triliun untuk MBG dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi penerima program dan mendukung tujuan pembangunan manusia. Namun, karena anggaran tersebut mengambil porsi cukup besar dari anggaran pendidikan, pemerintah perlu memastikan program berjalan tepat sasaran dan tidak mengurangi dukungan terhadap kebutuhan pendidikan lainnya seperti sekolah, guru, BOS, Program Indonesia Pintar, dan KIP Kuliah.
- Pengurangan kuota BBM bersubsidi dan pengembangan kendaraan listrik menunjukkan adanya perubahan arah kebijakan energi Indonesia. Jika penggunaan kendaraan listrik semakin berkembang, ketergantungan terhadap BBM dan energi impor dapat berkurang. Insentif untuk 1 juta motor listrik produksi dalam negeri juga dapat mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik dan membuka kesempatan kerja baru. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut akan bergantung pada kemampuan industri dalam negeri dan masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik secara lebih luas.
- Besarnya jumlah penduduk usia produktif menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Dengan sekitar 201,06 juta penduduk usia produktif, Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, jumlah tersebut harus diikuti dengan lapangan kerja yang cukup, pendidikan yang baik, keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, dan produktivitas yang tinggi. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, bonus demografi justru dapat menimbulkan masalah berupa pengangguran dan rendahnya produktivitas.
- Pengembangan ekonomi kreatif dan teknologi juga menjadi penting untuk memanfaatkan penduduk usia muda. Sektor tersebut memiliki peluang untuk menciptakan jenis pekerjaan dan usaha baru, tetapi tetap membutuhkan dukungan kebijakan dan anggaran yang tepat. Karena itu, efisiensi anggaran harus dilakukan tanpa menghilangkan dukungan terhadap sektor yang memiliki potensi pertumbuhan, terutama sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan generasi muda.

- Penguatan UMKM di Jawa Tengah melalui pembiayaan Bank Jateng dapat membantu meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Penyaluran kredit kepada sekitar 1.100 debitur dengan nilai Rp279 miliar memberikan tambahan modal bagi masyarakat dan pelaku usaha. Modal tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan produksi, membeli kebutuhan usaha, memperluas pemasaran, dan mengembangkan kegiatan usaha. Dengan jumlah UMKM Jawa Tengah yang mencapai lebih dari empat juta pelaku usaha, akses pembiayaan yang lebih mudah dapat memberikan pengaruh cukup besar terhadap kegiatan ekonomi daerah.
- Program Gebyar Fest 81 juga menunjukkan bahwa perbankan daerah tidak hanya berperan memberikan pinjaman, tetapi juga membantu UMKM masuk ke sistem ekonomi digital. Melalui penggunaan QRIS, layanan mobile banking, edukasi keuangan, dan akses berbagai produk perbankan, pelaku UMKM dapat mulai meningkatkan penggunaan layanan keuangan digital. Jika dilakukan secara berkelanjutan, hal ini dapat membantu UMKM menjadi lebih mudah melakukan transaksi, memperluas pasar, dan mengelola keuangan usahanya.
- Penguatan UMKM tersebut sejalan dengan kondisi ekonomi Jawa Tengah yang masih ditopang oleh konsumsi, investasi, industri pengolahan, dan perdagangan. Data terbaru Bank Indonesia menunjukkan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II-2026 tetap tumbuh, dengan investasi dan konsumsi rumah tangga menjadi salah satu pendorong utama, sementara industri pengolahan dan perdagangan memberikan kontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan UMKM dan pembiayaan usaha dapat berjalan bersama dengan perkembangan sektor industri dan perdagangan. ([Nuansa Jateng][1])
- Peningkatan aktivitas UMKM juga dapat membantu Jawa Tengah memperluas pasar produknya. Upaya mendorong UMKM agar mampu masuk ke pasar internasional, seperti melalui kegiatan kurasi produk dan persiapan menghadapi pasar Uni Eropa, menunjukkan bahwa UMKM Jawa Tengah memiliki peluang untuk berkembang tidak hanya di pasar lokal. Jika kualitas produk, kapasitas produksi, dan kemampuan memenuhi standar pasar internasional terus diperbaiki, UMKM berpotensi menjadi bagian dari peningkatan ekspor daerah. ([Nuansa Jateng][2])
- Secara keseluruhan, implikasi bagi Jawa Tengah adalah semakin pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, perbankan, UMKM, industri, dan masyarakat. Pemerintah perlu menciptakan lingkungan usaha yang mendukung, perbankan menyediakan pembiayaan dan layanan digital, sedangkan pelaku UMKM perlu meningkatkan kualitas produk dan kemampuan mengelola usaha. Dengan kerja sama tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tidak hanya bergantung pada industri besar, tetapi juga dapat diperkuat oleh UMKM dan ekonomi masyarakat.

Berita Senin, 17 Agustus

Kesimpulan

Secara keseluruhan, berbagai berita pada Senin, 17 Agustus 2026 menunjukkan bahwa kondisi perekonomian dunia masih berada dalam situasi yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Perkembangan ekonomi di berbagai negara memperlihatkan kondisi yang berbeda-beda, karena sebagian negara mengalami perlambatan akibat melemahnya konsumsi, investasi, dan aktivitas industri, sementara negara lainnya masih mampu tumbuh melalui perdagangan, ekspor, investasi, dan perkembangan teknologi. Situasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketegangan geopolitik, khususnya konflik di Timur Tengah yang masih memberikan tekanan terhadap pasokan energi dan kegiatan ekonomi global. Gangguan terhadap energi kemudian berpengaruh terhadap biaya produksi, perdagangan, inflasi, serta keputusan investasi di berbagai negara. Dengan kondisi tersebut,

perkembangan ekonomi internasional akhirnya menjadi faktor penting yang turut menentukan arah kebijakan ekonomi di negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Salah satu gambaran mengenai tekanan ekonomi global terlihat dari kondisi Jepang yang pertumbuhan ekonominya pada kuartal II 2026 hanya mencapai 1,1% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sebelumnya dan juga berada di bawah perkiraan pasar. Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh lemahnya konsumsi rumah tangga dan investasi bisnis, meskipun ekspor Jepang masih menunjukkan kinerja positif. Keadaan ini menunjukkan bahwa permintaan dalam negeri masih menjadi persoalan bagi negara tersebut, sementara kenaikan biaya energi dan gangguan rantai pasok akibat konflik Timur Tengah turut memberikan tekanan terhadap kegiatan ekonomi. Meskipun demikian, masih kuatnya ekspor dan meningkatnya permintaan terhadap produk yang berkaitan dengan kendaraan hibrida serta semikonduktor menunjukkan bahwa sektor eksternal masih dapat menjadi penopang pertumbuhan. Kondisi Jepang tersebut kemudian memperlihatkan bahwa pemulihan ekonomi global masih belum merata karena kekuatan ekspor belum sepenuhnya mampu mengimbangi lemahnya konsumsi dan investasi domestik.

Situasi yang lebih kompleks terlihat di China, karena perlambatan tidak hanya terjadi pada satu sektor, tetapi juga terlihat pada produksi industri, penjualan ritel, investasi, dan sektor properti. Produksi baja China pada Juli bahkan turun 3,6% secara tahunan menjadi 76,93 juta metrik ton dan menjadi produksi bulanan terendah pada tahun tersebut, sedangkan produksi selama tujuh bulan pertama turun 3,1%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa permintaan terhadap baja semakin lemah, terutama karena aktivitas konstruksi dan investasi aset tetap mengalami tekanan. Kondisi sektor properti yang belum pulih semakin memperbesar tekanan terhadap industri baja, sementara harga baja dan bijih besi juga mengalami penurunan. Tidak hanya baja, produksi minyak mentah, batu bara, dan listrik juga mengalami penurunan, sehingga keadaan tersebut menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi China mulai memberikan dampak yang lebih luas terhadap kegiatan industri dan komoditas. Karena China merupakan salah satu pusat ekonomi dan perdagangan dunia, pelemahan tersebut tentu menjadi perhatian bagi perekonomian negara-negara lain yang memiliki hubungan perdagangan dan rantai pasok dengan China.

Meskipun Jepang dan China menghadapi berbagai tekanan, kondisi negara-negara Asia lainnya menunjukkan bahwa peluang pertumbuhan masih tetap terbuka apabila didukung oleh sektor yang tepat. Thailand, misalnya, mampu mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 1,9% pada kuartal II 2026 secara tahunan, lebih tinggi dari perkiraan pasar sebesar 1,7%. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh investasi swasta, belanja pemerintah, dan ekspor, sehingga pemerintah Thailand menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 menjadi 2,0%–2,5%. Namun, Thailand tetap menghadapi persoalan berupa lemahnya konsumsi akibat tingginya utang rumah tangga dan biaya hidup. Sementara itu, Singapura justru mencatat pertumbuhan ekspor yang sangat kuat, dengan ekspor domestik nonmigas meningkat 24,2% pada Juli 2026. Kinerja tersebut terutama didorong oleh meningkatnya permintaan produk elektronik yang berkaitan dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun perekonomian global menghadapi tekanan, negara yang mampu memanfaatkan ekspor, teknologi, investasi, dan kebijakan pemerintah masih memiliki ruang untuk mempertahankan pertumbuhan.

Perbedaan perkembangan ekonomi tersebut pada akhirnya berkaitan erat dengan kondisi pasar keuangan global dan arah kebijakan moneter Amerika Serikat. Pelemahan data penjualan ritel, ketenagakerjaan, dan inflasi AS membuat ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga Federal Reserve dalam waktu dekat menjadi lebih rendah. Pelemahan dolar AS kemudian memberikan ruang bagi mata uang negara lain untuk menguat, termasuk yuan China yang bergerak mendekati level terkuat dalam sekitar tiga setengah tahun. Meskipun demikian, Bank Sentral China tetap berusaha menjaga agar penguatan yuan berlangsung secara bertahap dan tidak terlalu cepat. Di sisi lain, investor global masih memperhatikan arah kebijakan The Fed karena keputusan suku bunga Amerika Serikat dapat

memengaruhi imbal hasil obligasi, arus modal, nilai tukar, dan kebijakan moneter negara-negara lain. Oleh sebab itu, ketidakpastian kebijakan moneter global tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonominya.

Pengaruh kondisi global tersebut terlihat dalam kebijakan ekonomi Indonesia yang harus secara bersamaan menjaga pertumbuhan, stabilitas nilai tukar, inflasi, penerimaan negara, dan pembiayaan pemerintah. Salah satu kebijakan yang diberitakan adalah penyesuaian target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam RAPBN 2027 menjadi Rp316,6 triliun, turun Rp4 triliun dibandingkan revisi target APBN 2026. Di tengah penyesuaian tersebut, pemerintah tetap berusaha memperkuat penerimaan cukai melalui penataan cukai hasil tembakau dan penindakan terhadap rokok ilegal. Sampai semester I 2026, penerimaan cukai mencapai Rp109,4 triliun, sementara penindakan terhadap rokok ilegal mencapai 904 juta barang. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berusaha meningkatkan penerimaan, tetapi juga menata aktivitas ekonomi agar semakin banyak kegiatan usaha masuk ke dalam sistem legal. Dengan demikian, pengelolaan penerimaan negara menjadi bagian penting dalam menjaga kemampuan pemerintah membiayai berbagai program pembangunan.

Di samping memperkuat penerimaan negara, pemerintah juga berusaha memperbesar investasi karena investasi menjadi salah satu sumber penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk 2027, pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun atau meningkat 13,8% dibandingkan target 2026. Target tersebut akan dikejar melalui perbaikan iklim investasi, terutama dengan mempercepat proses perizinan, memberikan kepastian kepada investor, mempercepat pembangunan, dan menyelesaikan hambatan yang muncul di lapangan. Sistem OSS juga terus dikembangkan dengan integrasi antarkementerian dan lembaga serta rencana penerapan AI, big data, dan blockchain melalui OSS 2.0. Selain itu, program KLIK memungkinkan investor di 62 kawasan industri memulai pembangunan secara paralel dengan proses perizinan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menciptakan iklim investasi yang lebih cepat dan pasti, sehingga investasi tidak hanya tercatat sebagai angka, tetapi dapat segera diwujudkan menjadi kegiatan produksi dan lapangan kerja.

Namun, upaya meningkatkan investasi tersebut tetap harus berjalan bersama dengan kehati-hatian dalam mengelola pembiayaan negara karena kondisi suku bunga global masih berpotensi membuat biaya utang tetap tinggi. Proyeksi yield SBN 10 tahun pada 2027 diperkirakan berada pada kisaran 7%–7,4%, lebih tinggi dibandingkan asumsi pemerintah sebesar 6,9%. Pada saat yang sama, pembayaran bunga utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp650,3 triliun, sedangkan defisit RAPBN 2027 ditetapkan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40% terhadap PDB. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menentukan waktu dan sumber pembiayaan secara hati-hati agar biaya utang tidak semakin besar. Karena terdapat kemungkinan suku bunga turun pada semester II 2027, pemerintah disarankan tidak melakukan penerbitan utang secara besar-besaran sejak awal tahun. Dengan demikian, pengelolaan utang harus disesuaikan dengan perkembangan suku bunga dan kondisi pasar agar pembiayaan pembangunan tetap tersedia tanpa memberikan beban biaya yang terlalu besar kepada negara.

Persoalan pembiayaan tersebut kemudian berkaitan langsung dengan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan kondisi perekonomian dalam negeri. BI diperkirakan masih mempertahankan BI Rate pada level 5,75% karena tekanan inflasi mulai mereda dan nilai tukar rupiah relatif stabil. Pada 17 Agustus 2026, rupiah ditutup pada sekitar Rp17.798 per dolar AS, sementara inflasi nasional pada Juli turun menjadi 2,88% dari 3,34% pada bulan sebelumnya. Kondisi tersebut memberikan alasan bagi BI untuk belum menaikkan suku bunga dalam waktu dekat. Namun, BI tetap harus memperhatikan berbagai risiko eksternal, seperti kebijakan The Fed, imbal hasil US Treasury, pergerakan dolar AS, harga minyak, dan arus modal asing. Oleh karena itu, apabila tekanan terhadap rupiah meningkat kembali, BI masih membuka kemungkinan menaikkan suku bunga pada paruh kedua

2026. Sementara sebelum langkah tersebut diperlukan, BI diperkirakan akan mengoptimalkan kebijakan non-suku bunga dan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas rupiah.

Stabilitas ekonomi nasional yang terus dijaga tersebut kemudian menjadi landasan bagi perkembangan ekonomi di daerah, termasuk Jawa Tengah. Dalam berita, Jawa Tengah menunjukkan kinerja yang relatif positif karena pertumbuhan ekonomi pada semester I 2026 mencapai 5,80%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45%. Pertumbuhan tersebut juga diikuti dengan realisasi investasi sebesar Rp59,94 triliun yang terdiri atas PMA Rp25,92 triliun, PMDN Rp22,62 triliun, dan UMK Rp11,40 triliun. Investasi tersebut mampu menyerap sekitar 213 ribu tenaga kerja, sehingga menunjukkan adanya hubungan antara peningkatan aktivitas investasi dan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat. Perkembangan tersebut kemudian memberikan dampak terhadap indikator kesejahteraan, karena angka kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2026 turun dari 9,48% menjadi 9,21%, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 turun menjadi 4,24% dari 4,33% pada tahun sebelumnya.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja tersebut selanjutnya diarahkan agar tidak hanya menghasilkan perbaikan angka ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Jawa Tengah. Karena itu, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada kegiatan ekonomi, tetapi juga memperkuat pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Dalam bidang kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis dan Dokter Spesialis Keliling terus dilaksanakan hingga menjangkau ribuan desa dan disebut memiliki capaian tertinggi secara nasional. Dalam bidang pendidikan, pemerintah menjalankan program sekolah kemitraan yang memberikan kuota sekolah gratis kepada 5.004 anak dari keluarga miskin dan kurang mampu di sekolah swasta. Sementara itu, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan dan pengangguran tidak hanya diupayakan melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Pada akhirnya, seluruh rangkaian berita tersebut menunjukkan adanya hubungan yang berkesinambungan antara dinamika ekonomi global, kebijakan pemerintah Indonesia, dan kondisi masyarakat di Jawa Tengah. Tekanan ekonomi global yang berasal dari konflik geopolitik, perlambatan beberapa negara besar, perubahan harga energi, serta ketidakpastian kebijakan suku bunga menjadi tantangan yang harus diantisipasi oleh Indonesia melalui pengelolaan fiskal, investasi, utang, nilai tukar, dan inflasi yang hati-hati. Stabilitas nasional tersebut kemudian menjadi dasar bagi daerah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jawa Tengah memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80% dapat berjalan bersama dengan peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta perluasan layanan dasar. Karena itu, kesimpulan utama dari seluruh berita adalah bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menerjemahkan pertumbuhan tersebut menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan pesan Gubernur Jawa Tengah bahwa kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja nyata, gotong royong, dan kolaborasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, serta menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera.

Ringkasan

- Kondisi ekonomi dunia masih menghadapi banyak tekanan, terutama karena konflik geopolitik, perubahan harga energi, lemahnya permintaan masyarakat, dan ketidakpastian kebijakan suku bunga. Beberapa negara seperti Jepang dan China mengalami perlambatan, sedangkan Thailand dan Singapura masih mampu mencatat pertumbuhan yang cukup baik. Perbedaan ini

menunjukkan bahwa kondisi ekonomi setiap negara belum sama dan masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global.

- China menjadi salah satu negara yang menghadapi tekanan cukup besar, terlihat dari produksi baja yang turun 3,6% secara tahunan pada Juli 2026 menjadi 76,93 juta metrik ton. Penurunan ini terjadi karena permintaan baja melemah, kegiatan konstruksi menurun, investasi melambat, dan sektor properti masih mengalami masalah. Kondisi tersebut membuat harga baja dan bijih besi ikut turun, sehingga menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi China mulai berdampak pada berbagai kegiatan industri.
- Tekanan di China juga terlihat pada beberapa sektor energi dan komoditas. Pengolahan minyak mentah turun 16% secara tahunan, sedangkan produksi batu bara turun 10%. Produksi listrik dari pembangkit besar juga turun untuk pertama kalinya sejak 2022. Namun, penggunaan energi bersih menunjukkan perkembangan yang lebih baik karena meningkatnya penggunaan tenaga angin membantu memenuhi tambahan kebutuhan listrik.
- Berbeda dengan China, ekonomi Thailand masih tumbuh lebih baik dari perkiraan. Ekonomi Thailand tumbuh 1,9% pada kuartal II 2026, lebih tinggi dari perkiraan 1,7%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh investasi swasta, belanja pemerintah, dan ekspor. Namun, konsumsi masyarakat masih lemah karena utang rumah tangga dan biaya hidup yang tinggi. Karena kondisi ekonomi masih cukup baik, pemerintah menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Thailand sepanjang 2026 menjadi 2,0%–2,5%.
- Kinerja yang lebih kuat juga terlihat di Singapura, terutama dari sektor ekspor. Ekspor domestik nonmigas Singapura pada Juli 2026 meningkat 24,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh tingginya permintaan produk elektronik yang berhubungan dengan perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Karena ekspornya terus tumbuh, pemerintah Singapura menaikkan perkiraan pertumbuhan ekspor 2026 menjadi 14%–16%.
- Sementara itu, ekonomi Jepang tumbuh lebih lambat dari perkiraan, yaitu sebesar 1,1% pada kuartal II 2026. Perlambatan tersebut terutama terjadi karena konsumsi rumah tangga dan investasi bisnis masih lemah, walaupun ekspor tetap memberikan dukungan terhadap perekonomian. Kondisi Jepang, China, Thailand, dan Singapura ini menunjukkan bahwa ekonomi Asia masih bergerak tidak merata karena setiap negara menghadapi tantangan yang berbeda.
- Perbedaan kondisi ekonomi tersebut juga berkaitan dengan kebijakan suku bunga Amerika Serikat. Data ekonomi AS yang melemah membuat kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed dalam waktu dekat menjadi lebih kecil. Hal tersebut membuat dolar AS melemah dan memberikan kesempatan bagi beberapa mata uang lain untuk menguat, termasuk yuan China. Perubahan kebijakan The Fed tetap perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi nilai tukar, investasi, arus modal, dan kebijakan suku bunga di berbagai negara, termasuk Indonesia.
- Perubahan ekonomi global tersebut ikut menjadi perhatian Indonesia dalam menjaga kondisi ekonomi dalam negeri. Pemerintah perlu menjaga penerimaan negara, investasi, utang, inflasi, dan nilai tukar rupiah agar tetap stabil. Dalam RAPBN 2027, pemerintah menurunkan target penerimaan kepabeanan dan cukai menjadi Rp316,6 triliun atau turun Rp4 triliun dibandingkan revisi target APBN 2026. Di sisi lain, pemerintah tetap berusaha meningkatkan penerimaan dengan menata cukai hasil tembakau sekaligus meningkatkan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.
- Selain menjaga penerimaan negara, pemerintah juga terus mendorong investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Target investasi pada 2027 ditetapkan sebesar Rp2.322 triliun atau meningkat 13,8% dibandingkan target 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mempercepat dan memberikan kepastian dalam proses perizinan, memperbaiki sistem OSS, serta menyiapkan OSS 2.0 dengan teknologi AI, big data, dan

blockchain. Dengan proses perizinan yang lebih mudah dan cepat, investasi diharapkan dapat segera berjalan dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

- Namun, pemerintah juga perlu berhati-hati dalam mengelola utang karena biaya pembiayaan masih cukup tinggi. Pembayaran bunga utang pemerintah pada 2027 diperkirakan mencapai Rp650,3 triliun, sedangkan defisit RAPBN 2027 ditetapkan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40% terhadap PDB. Karena itu, penerbitan utang perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suku bunga agar pemerintah tidak menanggung biaya yang terlalu mahal. Pemerintah juga dapat memilih antara penerbitan SBN atau pinjaman berdasarkan sumber pembiayaan yang biayanya lebih rendah.
- Di tengah kebutuhan pembiayaan tersebut, Bank Indonesia diperkirakan masih mempertahankan BI Rate sebesar 5,75%. Alasannya, nilai tukar rupiah mulai lebih stabil dan inflasi nasional turun menjadi 2,88% pada Juli 2026 dari 3,34% pada bulan sebelumnya. Rupiah juga ditutup menguat pada sekitar Rp17.798 per dolar AS pada 17 Agustus 2026. Walaupun demikian, BI tetap perlu memperhatikan kebijakan The Fed, harga minyak, pergerakan dolar AS, dan arus modal asing karena faktor-faktor tersebut dapat kembali memberikan tekanan terhadap rupiah.
- Setelah melihat kondisi nasional, perkembangan ekonomi Jawa Tengah menunjukkan hasil yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada semester I 2026 mencapai 5,80%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45%. Pada periode yang sama, realisasi investasi mencapai Rp59,94 triliun dan mampu menyerap sekitar 213 ribu tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan investasi ikut membantu pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
- Pertumbuhan ekonomi dan investasi tersebut juga diikuti dengan membaiknya kondisi kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan Jawa Tengah turun dari 9,48% menjadi 9,21%, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,24% dari 4,33% pada tahun sebelumnya. Pemerintah Jawa Tengah menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terlihat dari angka, tetapi juga harus memberikan manfaat melalui bertambahnya lapangan kerja dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
- Untuk melanjutkan perbaikan tersebut, Pemerintah Jawa Tengah juga memperkuat pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Program Cek Kesehatan Gratis dan Dokter Spesialis Keliling terus diperluas hingga menjangkau ribuan desa. Di bidang pendidikan, program sekolah kemitraan memberikan kesempatan sekolah gratis kepada 5.004 anak dari keluarga miskin dan kurang mampu, sedangkan perbaikan ribuan Rumah Tidak Layak Huni terus dilakukan setiap tahun. Program-program tersebut bertujuan agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Implikasi

- Perlambatan ekonomi Jepang dan China menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dunia masih belum stabil. Lemahnya konsumsi, investasi, industri, dan sektor properti dapat membuat pertumbuhan kedua negara tersebut semakin lambat. Jika kondisi ini berlanjut, permintaan barang dan bahan baku dari negara lain juga dapat menurun, sehingga negara yang banyak melakukan perdagangan dengan Jepang dan China perlu mengantisipasi kemungkinan berkurangnya ekspor.
- Penurunan produksi baja China menunjukkan bahwa lemahnya sektor properti mulai berdampak pada kegiatan industri. Ketika pembangunan dan investasi berkurang, kebutuhan terhadap baja dan bijih besi juga ikut menurun. Kondisi ini dapat menekan harga komoditas dan memengaruhi negara-negara yang memasok bahan baku ke China, terutama jika permintaan dari China terus melemah.
- Perubahan produksi energi di China juga dapat memengaruhi pasar komoditas dunia. Pengolahan minyak mentah turun 16% dan produksi batu bara turun 10%, sementara

penggunaan energi bersih mulai meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan kegiatan ekonomi China dapat memengaruhi kebutuhan minyak, batu bara, dan komoditas lainnya, sehingga perkembangan ekonomi China tetap penting untuk diperhatikan oleh negara-negara penghasil komoditas.

- Pertumbuhan ekonomi Thailand yang lebih baik dari perkiraan menunjukkan bahwa investasi, ekspor, dan belanja pemerintah masih mampu menjaga ekonomi tetap tumbuh. Namun, konsumsi masyarakat masih lemah karena tingginya utang rumah tangga dan biaya hidup. Karena itu, pemerintah tetap perlu menjaga daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya berasal dari investasi dan ekspor, tetapi juga didukung oleh konsumsi dalam negeri.
- Kenaikan ekspor Singapura menunjukkan bahwa perkembangan teknologi AI memberikan peluang baru bagi kegiatan ekonomi. Permintaan yang tinggi terhadap produk elektronik terkait AI mampu mendorong ekspor Singapura tumbuh 24,2%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dapat menjadi sumber pertumbuhan baru, terutama bagi negara yang memiliki industri elektronik dan teknologi yang kuat.
- Perubahan kebijakan suku bunga Amerika Serikat dapat memengaruhi kondisi ekonomi negara lain, termasuk Indonesia. Melemahnya beberapa data ekonomi AS membuat kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed dalam waktu dekat menjadi lebih kecil dan dolar AS ikut melemah. Namun, arah kebijakan The Fed tetap perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi nilai tukar, arus modal, dan suku bunga di berbagai negara.
- Ketidakpastian ekonomi dunia membuat Indonesia perlu lebih hati-hati dalam menjaga kondisi ekonomi dalam negeri. Perubahan suku bunga AS, harga minyak, nilai dolar, dan arus modal asing dapat memberikan tekanan terhadap rupiah. Karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga inflasi dan nilai tukar sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan kegiatan usaha.
- Penurunan target penerimaan kepabeanan dan cukai menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan dalam meningkatkan penerimaan negara. Target penerimaan 2027 ditetapkan sebesar Rp316,6 triliun atau turun Rp4 triliun dibandingkan revisi target APBN 2026. Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan melalui cara lain, termasuk menata cukai hasil tembakau dan meningkatkan penindakan terhadap rokok ilegal.
- Target investasi 2027 sebesar Rp2.322 triliun dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Agar target tersebut tercapai, pemerintah perlu membuat proses perizinan lebih mudah, cepat, dan jelas. Pengembangan sistem OSS dengan teknologi AI, big data, dan blockchain diharapkan dapat mengurangi hambatan investasi sehingga proyek dapat lebih cepat berjalan dan memberikan manfaat bagi perekonomian.
- Peningkatan investasi juga dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat. Jika proyek investasi dapat segera dibangun dan dijalankan, kebutuhan tenaga kerja akan meningkat dan kegiatan ekonomi di sekitar proyek juga dapat berkembang. Oleh karena itu, kemudahan investasi perlu terus diperbaiki agar investasi yang masuk benar-benar dapat diwujudkan menjadi kegiatan ekonomi.
- Besarnya pembayaran bunga utang menjadi tantangan bagi keuangan pemerintah. Pada 2027, pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai Rp650,3 triliun, sementara defisit RAPBN mencapai Rp671,2 triliun atau 2,40% terhadap PDB. Karena itu, pemerintah perlu mengatur utang dengan hati-hati agar biaya pembayaran bunga tidak terlalu membebani anggaran negara.
- Pemerintah juga perlu memilih waktu dan sumber utang yang paling murah. Jika suku bunga masih tinggi, penerbitan utang dalam jumlah besar dapat membuat biaya yang harus dibayar pemerintah semakin mahal. Oleh karena itu, pemerintah dapat menyesuaikan penerbitan SBN dan pinjaman dengan kondisi pasar serta memilih sumber pembiayaan yang lebih menguntungkan.
- BI Rate yang diperkirakan tetap sebesar 5,75% dapat membantu menjaga kegiatan ekonomi agar tidak mendapat tambahan tekanan dari kenaikan suku bunga. Inflasi yang mulai turun dan

rupiah yang relatif stabil membuat BI belum perlu terburu-buru menaikkan suku bunga. Namun, BI tetap harus memperhatikan perkembangan The Fed, dolar AS, harga minyak, dan arus modal asing karena faktor tersebut dapat kembali memberikan tekanan terhadap rupiah.

- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,80% menunjukkan bahwa ekonomi daerah masih berkembang dengan cukup baik. Pertumbuhan tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,45%. Kondisi ini perlu terus dijaga agar kegiatan usaha dan investasi semakin berkembang, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
- Realisasi investasi sebesar Rp59,94 triliun memberikan dampak positif terhadap lapangan kerja di Jawa Tengah. Investasi tersebut mampu menyerap sekitar 213 ribu tenaga kerja, sehingga peningkatan investasi dapat membantu masyarakat memperoleh pekerjaan. Karena itu, pemerintah daerah perlu terus menjaga iklim investasi agar semakin banyak usaha dan proyek yang berkembang di Jawa Tengah.
- Pertumbuhan ekonomi dan investasi juga ikut berjalan bersama dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan turun dari 9,48% menjadi 9,21%, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 4,33% menjadi 4,24%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diarahkan untuk menciptakan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Program Cek Kesehatan Gratis dan Dokter Spesialis Keliling dapat membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan lebih mudah. Program tersebut terus diperluas hingga menjangkau ribuan desa, sehingga masyarakat yang jauh dari fasilitas kesehatan besar dapat memperoleh pelayanan yang lebih dekat. Dengan demikian, peningkatan ekonomi juga berjalan bersama dengan peningkatan pelayanan kesehatan.
- Program sekolah gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu dapat membantu meningkatkan akses pendidikan. Program sekolah kemitraan memberikan kuota sekolah gratis kepada 5.004 anak setiap tahun, sehingga anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan lebih besar untuk tetap bersekolah. Dalam jangka panjang, pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya.
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah. Program ini melengkapi upaya pemerintah dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan karena kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi juga oleh tempat tinggal yang layak dan pelayanan dasar yang baik. Karena itu, berbagai program tersebut perlu berjalan bersama agar penanganan kemiskinan menjadi lebih menyeluruh.

Berita Selasa, 18 Agustus

Kesimpulan

Secara keseluruhan, berita internasional pada Selasa, 18 Agustus 2026 menunjukkan bahwa perekonomian global masih menghadapi tekanan yang saling berkaitan antara inflasi, tingginya suku bunga, meningkatnya beban utang pemerintah, konflik geopolitik, gangguan pasokan energi, serta perubahan arah arus modal. Kondisi tersebut terlihat dari kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat, Jepang, dan sejumlah negara Eropa ke level yang sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Di Amerika Serikat, imbal hasil Treasury 30 tahun mencapai level tertinggi sejak 2007, sementara imbal hasil Treasury 10 tahun berada di sekitar 4,74% dan semakin mendekati level 5% yang dinilai penting bagi sentimen pasar. Kenaikan tersebut tidak terlepas dari kembali meningkatnya harga minyak yang telah menembus US\$90 per barel serta mudahnya harapan perdamaian antara Amerika

Serikat dan Iran. Pada saat yang sama, tingginya utang pemerintah di berbagai negara membuat kenaikan biaya pembiayaan menjadi semakin penting untuk diperhatikan karena dapat meningkatkan beban pemerintah, perusahaan, maupun rumah tangga.

Tekanan yang sama juga terlihat di Jepang dan Eropa, sehingga persoalan ekonomi global tidak hanya berpusat pada Amerika Serikat. Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang tenor 10 tahun mendekati 3%, merupakan level tertinggi dalam tiga dekade, sementara imbal hasil obligasi Jepang tenor 30 tahun telah sedikit di atas 4% dan mulai membuat surat utang domestik lebih menarik bagi investor Jepang. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi permintaan investor Jepang terhadap Treasury Amerika Serikat, yang selama ini menjadi salah satu pembeli besar surat utang AS. Di Eropa, imbal hasil obligasi Jerman, Prancis, dan Inggris juga meningkat karena tingginya belanja pemerintah, beban utang, inflasi, serta kebutuhan belanja yang berkaitan dengan perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pasar keuangan global sedang memasuki kondisi yang lebih sulit diprediksi, karena pemerintah harus membiayai kebutuhan yang besar ketika suku bunga dan biaya pinjaman tetap tinggi. Kenaikan biaya pendanaan tersebut pada akhirnya dapat memperketat kondisi keuangan dan menekan pertumbuhan ekonomi maupun harga berbagai aset keuangan.

Selain persoalan pasar keuangan, konflik Amerika Serikat dan Iran memberikan tekanan langsung terhadap perekonomian Iran dan sekaligus memperbesar risiko ekonomi global. Iran memasuki perang dengan kondisi ekonomi yang sebelumnya sudah rapuh, ditandai inflasi tinggi, pelemahan mata uang, kekurangan energi, sanksi ekonomi, dan berbagai masalah struktural. Perang yang berlangsung hampir enam bulan kemudian menyebabkan kerusakan infrastruktur, gangguan perdagangan, hilangnya produksi, serta meningkatnya biaya pembangunan kembali. Tekanan tersebut semakin berat karena Amerika Serikat kembali mengancam memberikan sanksi ekonomi yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Kondisi ekonomi Iran juga semakin sulit akibat terganggunya aktivitas konstruksi, usaha ekspor-impor, transportasi, produksi, serta distribusi barang. Dengan demikian, konflik tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga mengurangi kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan risiko munculnya kembali ketidakpuasan sosial dan kerusuhan.

Dampak tekanan ekonomi tersebut kemudian terlihat sangat jelas pada kehidupan masyarakat Iran. Inflasi tahunan Iran mencapai 66% pada Juli, sementara harga konsumen meningkat 87,9% dibandingkan tahun sebelumnya dan inflasi pangan bahkan mencapai 128%. Tingginya inflasi membuat masyarakat mengurangi konsumsi daging dan kebutuhan pokok serta beralih ke barang yang lebih murah. Pelemahan nilai tukar rial juga terus mengurangi daya beli meskipun pemerintah telah menaikkan upah minimum sekitar 60%. Di sisi lain, biaya sewa rumah meningkat dan pendapatan masyarakat semakin tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Gangguan transportasi akibat serangan terhadap sejumlah jembatan membuat distribusi barang semakin mahal dan lambat, sementara penjualan minyak dan penerimaan pajak juga menurun. Bahkan impor bensin secara efektif terhenti, sedangkan produksi bensin harian masih berada di bawah tingkat konsumsi. Keadaan tersebut memperlihatkan bagaimana konflik geopolitik dapat berkembang menjadi persoalan ekonomi, energi, perdagangan, dan kesejahteraan masyarakat secara bersamaan.

Tekanan global berikutnya terlihat dari perkembangan ekonomi negara-negara Asia. Mata uang Asia bergerak beragam terhadap dolar AS, dengan won Korea Selatan dan ringgit Malaysia menjadi mata uang yang menguat paling besar pada perdagangan 18 Agustus. Penguatan tersebut terjadi karena dolar AS masih berada di bawah tekanan dan investor mengurangi perkiraan kenaikan suku bunga Federal Reserve dalam waktu dekat setelah munculnya sejumlah data ekonomi AS yang menunjukkan pelemahan. Namun, kondisi kawasan Asia tidak seragam karena yen Jepang, baht Thailand, peso Filipina, yuan China, dan beberapa mata uang lainnya mengalami pelemahan. Rupiah termasuk mata uang yang mengalami tekanan cukup besar, turun 0,08% menjadi Rp17.835 per dolar AS dan secara kumulatif melemah 6,53% sepanjang 2026. Pergerakan mata uang tersebut memperlihatkan bahwa

perubahan kebijakan moneter AS, kondisi ekonomi global, serta arus modal internasional tetap menjadi faktor penting bagi stabilitas nilai tukar negara-negara Asia, termasuk Indonesia.

Perkembangan ekonomi Jepang juga memperlihatkan bahwa tekanan global mulai memengaruhi pertumbuhan negara maju di kawasan Asia. PDB Jepang pada kuartal II-2026 hanya tumbuh 1,1% secara tahunan atau 0,3% secara kuartalan, lebih rendah daripada perkiraan pasar masing-masing sebesar 2% dan 0,5%. Pertumbuhan tersebut memang masih memperpanjang ekspansi ekonomi Jepang menjadi tiga kuartal berturut-turut, tetapi konsumsi swasta hampir stagnan karena kenaikan harga mengurangi daya beli masyarakat. Investasi perusahaan bahkan turun 1,2%, berlawanan dengan perkiraan sebelumnya yang mengharapkan pertumbuhan investasi. Dukungan masih datang dari sektor eksternal, terutama permintaan Amerika Serikat terhadap kendaraan hibrida Jepang dan investasi global di bidang AI yang mendukung ekspor peralatan serta komponen semikonduktor. Namun, meningkatnya biaya impor dan energi menjadi risiko bagi konsumsi, sehingga pemerintah Jepang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun fiskal 2026 dari 1,3% menjadi 0,9%.

Tekanan ekonomi juga semakin diperkuat oleh faktor perubahan iklim dan cuaca ekstrem di Eropa. Gelombang panas kelima yang melanda kawasan tersebut menurunkan produktivitas tenaga kerja, menekan konsumsi, meningkatkan biaya operasional perusahaan, mengganggu transportasi, serta berpotensi menurunkan hasil pertanian. Di Padua, Italia, lebih dari 80% usaha perhotelan yang disurvei mengalami penurunan omzet sekitar 20% selama gelombang panas terbaru. Dampak ekonomi tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menjadi risiko langsung bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi. Perlindungan asuransi terhadap gangguan usaha juga masih terbatas, sehingga kerugian akibat panas ekstrem dan kekeringan belum sepenuhnya terlindungi. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya asuransi parametrik yang memberikan pembayaran ketika suhu melewati batas tertentu. Dengan demikian, tekanan global yang berasal dari konflik, inflasi, pasar keuangan, dan perubahan iklim saling berhubungan dan menciptakan lingkungan ekonomi yang semakin kompleks bagi berbagai negara.

Perkembangan global tersebut kemudian memiliki keterkaitan dengan kebijakan ekonomi Indonesia, terutama dalam penyusunan RAPBN 2027. Pemerintah Indonesia berusaha melakukan konsolidasi fiskal dengan menetapkan defisit APBN 2027 sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40% terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan outlook 2026. Pada saat yang sama, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga muncul penilaian bahwa target pertumbuhan tersebut cukup ambisius karena belanja negara hanya tumbuh sekitar 3,9%. Pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang investasi, kredit, BUMN, Danantara, serta program di luar belanja langsung pemerintah. Di sisi lain, pembayaran bunga utang mencapai Rp650,3 triliun dan keseimbangan primer masih negatif. Artinya, pemerintah berusaha menjaga disiplin fiskal dan defisit di bawah 3%, tetapi tetap harus memastikan bahwa konsolidasi fiskal tidak dilakukan melalui pengurangan belanja secara berlebihan karena dapat menekan pertumbuhan ekonomi ketika kondisi ekonomi sedang membutuhkan dukungan.

Kebijakan fiskal tersebut juga terlihat dari perubahan arah belanja perpajakan Indonesia. Pemerintah memproyeksikan belanja perpajakan 2027 mencapai Rp632 triliun atau meningkat 9,6% dibandingkan proyeksi 2026 sebesar Rp576,4 triliun, tetapi tingkat pertumbuhannya menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir. Perlambatan tersebut tidak berarti insentif pajak dihapus secara besar-besaran, melainkan menunjukkan adanya upaya untuk membuat pemberian insentif menjadi lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Pemerintah diharapkan mengevaluasi insentif yang tidak menghasilkan tambahan kegiatan ekonomi, sementara insentif tetap dapat diarahkan kepada sektor yang mampu mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, ekspor, hilirisasi, produktivitas, manufaktur padat karya, dan UMKM. Dengan demikian, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan meningkatkan penerimaan negara dan kebutuhan mempertahankan daya beli serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Tantangan Indonesia juga berkaitan erat dengan stabilitas rupiah dan kondisi pembiayaan negara. Berita menyebutkan bahwa asumsi rupiah RAPBN 2027 sebesar Rp17.500 per dolar AS masih dinilai cukup realistis, meskipun terdapat kemungkinan rupiah berada sedikit lebih lemah. Pelemahan rupiah tidak selalu memberikan dampak negatif karena dapat meningkatkan nilai rupiah dari penerimaan ekspor, pajak penghasilan migas, dan PNBP migas, tetapi pada saat yang sama dapat meningkatkan pembayaran bunga utang valuta asing serta subsidi dan kompensasi energi. Risiko yang lebih besar akan muncul apabila pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan kenaikan harga minyak karena Indonesia merupakan pengimpor bersih minyak. Dalam kondisi tersebut, subsidi energi, biaya impor, inflasi, pembayaran bunga, dan kebutuhan pembiayaan pemerintah dapat meningkat secara bersamaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat ekspor, investasi langsung, devisa hasil ekspor, industri substitusi impor, hilirisasi, serta kredibilitas fiskal agar tekanan eksternal tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih besar terhadap APBN.

Dari sisi pembiayaan, posisi utang luar negeri pemerintah Indonesia pada kuartal II-2026 mencapai US\$216,3 miliar atau tumbuh 2,9% secara tahunan, sedangkan utang luar negeri swasta mencapai US\$194,6 miliar dan masih mengalami kontraksi 0,6%. Utang pemerintah terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara dan tetap diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif. Penggunaan ULN pemerintah mencakup sektor kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, pendidikan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan. Sementara itu, ULN swasta terutama berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan sebagian besar berupa utang jangka panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan utang tetap menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi Indonesia, terutama ketika pemerintah juga harus menjaga stabilitas rupiah, membiayai pembangunan, dan menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Berbagai tantangan ekonomi nasional tersebut kemudian memiliki hubungan langsung dengan kondisi pembangunan di Jawa Tengah. Dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan bahwa kemerdekaan harus diisi melalui kerja nyata untuk mewujudkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur. Kerja nyata tersebut harus dilakukan melalui kebersamaan dan gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak. Prioritas yang ditekankan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Di bidang pendidikan, pemerintah provinsi berupaya memperluas akses pendidikan, mengembalikan anak-anak yang putus sekolah, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari perundungan. Di bidang kesehatan, Jawa Tengah juga mencatat capaian positif melalui Cek Kesehatan Gratis yang terintegrasi dengan layanan dokter spesialis keliling, bahkan disebut sebagai provinsi dengan capaian tertinggi dalam pelayanan tersebut.

Pada akhirnya, kondisi Jawa Tengah dalam berita menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan mulai memberikan hasil yang cukup positif sekaligus menjadi bagian dari upaya menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada semester I-2026 mencapai 5,80%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45%. Realisasi investasi mencapai Rp59,94 triliun yang terdiri atas PMA Rp25,92 triliun, PMDN Rp22,62 triliun, dan investasi UMK Rp11,40 triliun, serta mampu menyerap sekitar 213 ribu tenaga kerja. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga turun dari 9,48% menjadi 9,21%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,24% dari 4,33% pada Februari 2025. Jawa Tengah juga dinilai sebagai salah satu tujuan investasi yang menarik karena didukung infrastruktur, kemudahan perizinan, kondisi wilayah yang kondusif, serta biaya hidup yang kompetitif. Dengan demikian, rangkaian berita dari internasional hingga Jawa Tengah memperlihatkan bahwa meskipun perekonomian menghadapi tekanan global berupa konflik, inflasi, suku bunga, nilai tukar, utang, dan perubahan iklim, pembangunan daerah tetap dapat diperkuat melalui kebijakan fiskal yang hati-hati, investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pelayanan dasar, serta kolaborasi pemerintah dan masyarakat.

Ringkasan

- Kondisi ekonomi dunia masih menghadapi banyak tekanan, terutama karena inflasi, tingginya utang pemerintah, kenaikan harga minyak, dan konflik geopolitik. Hal ini terlihat dari naiknya imbal hasil obligasi pemerintah di Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara Eropa. Di Amerika Serikat, imbal hasil obligasi jangka panjang mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun, sementara harga minyak kembali menembus US\$90 per barel. Kondisi ini membuat kekhawatiran terhadap inflasi kembali meningkat, terutama karena harapan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran mulai melemah.
- Tekanan tersebut juga dirasakan Jepang dan negara-negara Eropa, karena biaya pinjaman pemerintah ikut meningkat. Di Jepang, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun mendekati 3%, sedangkan obligasi pemerintah Jerman, Prancis, dan Inggris juga mengalami kenaikan. Kondisi ini menjadi perhatian karena beberapa negara tersebut memiliki utang pemerintah yang tinggi. Jika biaya pinjaman terus meningkat, pemerintah harus mengeluarkan dana yang lebih besar untuk membayar bunga utang sehingga ruang untuk membiayai kebutuhan lainnya dapat semakin terbatas.
- Di tengah tekanan pasar keuangan tersebut, konflik Amerika Serikat dan Iran juga semakin membebani ekonomi Iran. Gangguan terhadap jalur transportasi membuat pengiriman barang menjadi lebih lama dan mahal, sementara penjualan minyak dan penerimaan pajak Iran ikut menurun. Impor bensin juga terganggu, sedangkan produksi bensin dalam negeri sekitar 130 juta liter per hari masih lebih rendah daripada kebutuhan masyarakat yang mencapai sekitar 137 juta liter. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik telah berdampak langsung terhadap perdagangan, energi, pendapatan negara, dan kehidupan masyarakat Iran.
- Masalah ekonomi Iran semakin berat karena harga kebutuhan masyarakat terus meningkat dan daya beli semakin menurun. Tingginya inflasi membuat masyarakat harus mengurangi konsumsi dan memilih barang yang lebih murah, sementara pelemahan nilai tukar rial membuat kemampuan masyarakat membeli kebutuhan semakin terbatas. Ditambah dengan naiknya biaya tempat tinggal dan terganggunya distribusi barang, masyarakat Iran menghadapi tekanan ekonomi yang semakin besar. Jika kondisi ini terus berlangsung, pemerintah Iran akan semakin sulit menjaga kestabilan ekonomi sekaligus mengurangi ketidakpuasan masyarakat.
- Ketidakpastian ekonomi global kemudian terlihat pada pergerakan mata uang negara-negara Asia yang berbeda-beda. Won Korea Selatan dan ringgit Malaysia mengalami penguatan karena dolar AS sedang berada dalam tekanan, sedangkan beberapa mata uang Asia lainnya masih melemah. Rupiah juga turun 0,08% menjadi Rp17.835 per dolar AS dan sepanjang 2026 telah melemah sekitar 6,53%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan ekonomi Amerika Serikat, kebijakan suku bunga, arus modal, dan ketidakpastian global masih sangat memengaruhi mata uang negara-negara Asia.
- Tekanan global juga mulai memengaruhi pertumbuhan ekonomi Jepang, yang pada kuartal II-2026 tumbuh lebih rendah dari perkiraan. Ekonomi Jepang hanya tumbuh 1,1% secara tahunan karena konsumsi masyarakat hampir tidak bertambah dan investasi perusahaan turun 1,2%. Meskipun ekspor masih terbantu oleh permintaan kendaraan hibrida dan produk semikonduktor, kenaikan biaya energi dan impor tetap menjadi masalah. Karena kondisi tersebut, pemerintah Jepang menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun fiskal 2026 dari 1,3% menjadi 0,9%.
- Selain konflik dan masalah ekonomi, cuaca ekstrem juga mulai memberikan dampak terhadap perekonomian Eropa. Gelombang panas yang terjadi berulang kali menurunkan produktivitas pekerja, mengurangi konsumsi masyarakat, meningkatkan biaya perusahaan, serta mengganggu transportasi dan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan iklim juga dapat menjadi masalah ekonomi karena dapat menghambat kegiatan usaha dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun perusahaan.

- Berbagai tekanan ekonomi dunia tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menjaga kondisi ekonomi dan keuangan negara. Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40% terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan 2026. Namun, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 6%, sementara belanja negara hanya tumbuh sekitar 3,9%. Karena itu, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah, tetapi juga didukung oleh investasi, kredit, BUMN, Danantara, dan sumber pertumbuhan lainnya.
- Untuk mendukung perekonomian, pemerintah juga tetap memberikan berbagai kemudahan dan insentif melalui kebijakan perpajakan. Belanja perpajakan pada 2027 diperkirakan mencapai Rp632 triliun, naik dari Rp576,4 triliun pada 2026, tetapi pertumbuhannya melambat menjadi 9,6%. Pemerintah perlu memastikan bahwa insentif pajak diberikan kepada sektor yang benar-benar membutuhkan dan memberikan manfaat bagi ekonomi, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat serta membantu sektor manufaktur padat karya dan UMKM.
- Selain menjaga APBN, pemerintah juga perlu memperhatikan pelemahan rupiah karena dapat memengaruhi kondisi keuangan negara. Asumsi rupiah dalam RAPBN 2027 sebesar Rp17.500 per dolar AS dinilai cukup realistis, walaupun masih ada kemungkinan rupiah berada sedikit lebih lemah. Rupiah yang melemah memang dapat meningkatkan beberapa penerimaan negara dari sektor ekspor dan migas, tetapi juga dapat meningkatkan biaya pembayaran utang luar negeri serta subsidi energi. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat ekspor, investasi, devisa hasil ekspor, hilirisasi, dan industri dalam negeri untuk membantu menjaga kestabilan rupiah.
- Pengelolaan utang juga tetap menjadi perhatian karena Indonesia masih menggunakan utang luar negeri untuk mendukung pembangunan. Utang luar negeri pemerintah pada kuartal II-2026 mencapai US\$216,3 miliar atau tumbuh 2,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Utang tersebut digunakan untuk mendukung berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, konstruksi, transportasi, pemerintahan, serta kegiatan sosial. Karena itu, penggunaan utang perlu terus dikelola dengan hati-hati agar benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif dan tidak menambah beban keuangan negara secara berlebihan.
- Di tengah berbagai tantangan ekonomi tersebut, Jawa Tengah terus mendorong pembangunan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan bahwa kemerdekaan perlu diisi dengan kerja nyata melalui kerja sama dan gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak. Pemerintah Jawa Tengah menjadikan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas, mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan hingga kesehatan, sehingga pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Perhatian terhadap kesejahteraan tersebut juga terlihat dari program pendidikan dan kesehatan yang terus diperkuat. Pemerintah Jawa Tengah berusaha memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan, membantu anak yang putus sekolah agar dapat kembali belajar, serta menciptakan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan. Di bidang kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis yang terhubung dengan layanan dokter spesialis keliling juga terus dijalankan dan Jawa Tengah disebut memiliki capaian pelayanan yang tinggi.
- Program pelayanan masyarakat tersebut berjalan bersama dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang cukup baik. Pada semester I-2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,80%, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45%. Pada periode yang sama, investasi mencapai Rp59,94 triliun yang berasal dari investasi asing, investasi dalam negeri, serta investasi usaha mikro dan kecil. Investasi tersebut juga mampu menyerap sekitar 213 ribu tenaga kerja, sehingga masuknya investasi memberikan manfaat terhadap kegiatan ekonomi sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
- Pertumbuhan ekonomi dan investasi tersebut juga diikuti dengan membaiknya kondisi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Angka kemiskinan turun dari 9,48% menjadi 9,21%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,33% pada Februari 2025 menjadi 4,24%

pada Februari 2026. Perbaikan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan program pemerintah mulai berjalan bersama dalam membantu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat.

- Ke depan, investasi menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah karena pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan APBD. Jawa Tengah dinilai menarik bagi investor karena memiliki infrastruktur yang cukup baik, proses perizinan yang mudah, kondisi wilayah yang aman dan kondusif, serta biaya hidup yang kompetitif. Pemerintah daerah karena itu terus menjaga iklim investasi, memperbaiki infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia, serta menawarkan berbagai potensi daerah kepada investor agar investasi dapat terus meningkat dan membantu mengurangi kemiskinan serta pengangguran.

Implikasi

- Kenaikan imbal hasil obligasi di Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa dapat membuat biaya pinjaman semakin mahal. Kondisi ini terutama menjadi masalah bagi negara yang memiliki utang besar karena pembayaran bunga dapat meningkat. Jika biaya pinjaman terus tinggi, pemerintah akan memiliki ruang yang lebih terbatas untuk membiayai kebutuhan lain, sementara perusahaan juga dapat lebih berhati-hati dalam melakukan investasi.
- Kenaikan harga minyak hingga lebih dari US\$90 per barel dapat membuat tekanan inflasi dunia kembali meningkat. Harga minyak yang tinggi dapat menaikkan biaya energi, produksi, dan pengiriman barang, sehingga harga barang yang dibayar masyarakat juga dapat meningkat. Kondisi ini dapat membuat bank sentral lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan suku bunga karena inflasi masih menjadi risiko bagi perekonomian.
- Konflik yang melibatkan Iran dapat semakin memperburuk kondisi ekonomi negara tersebut. Gangguan transportasi membuat pengiriman barang menjadi lebih lama dan mahal, sedangkan penjualan minyak dan penerimaan pajak juga menurun. Pada saat yang sama, impor bensin terganggu ketika produksi dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan, sehingga masalah ekonomi Iran dapat semakin meluas ke sektor energi dan kehidupan masyarakat sehari-hari.
- Tekanan ekonomi yang berat juga dapat semakin menurunkan daya beli masyarakat Iran. Tingginya inflasi, kenaikan harga pangan, pelemahan mata uang, dan meningkatnya biaya hidup membuat masyarakat harus mengurangi pengeluaran dan memilih barang yang lebih murah. Jika keadaan tersebut terus berlangsung, kehidupan masyarakat akan semakin sulit dan pemerintah Iran juga akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjaga kondisi ekonomi dan sosial tetap stabil.
- Pergerakan mata uang Asia yang berbeda-beda menunjukkan bahwa kondisi ekonomi global masih tidak stabil. Won Korea Selatan dan ringgit Malaysia menguat, sedangkan rupiah dan beberapa mata uang Asia lainnya mengalami tekanan. Bagi negara yang mata uangnya melemah, biaya membeli barang dari luar negeri dapat menjadi lebih mahal, terutama untuk kebutuhan energi dan bahan baku yang masih bergantung pada impor.
- Perlambatan ekonomi Jepang menunjukkan bahwa kenaikan harga mulai memengaruhi konsumsi dan kegiatan usaha. Konsumsi masyarakat hampir tidak bertambah karena daya beli tertekan, sementara investasi perusahaan juga mengalami penurunan. Walaupun ekspor masih memberikan dukungan, tingginya biaya energi dan impor tetap dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Jepang jika berlangsung dalam waktu yang lama.
- Cuaca ekstrem di Eropa juga dapat memberikan dampak yang semakin besar terhadap kegiatan ekonomi. Gelombang panas dapat mengurangi produktivitas pekerja, mengganggu transportasi dan pertanian, serta meningkatkan biaya perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan iklim perlu semakin diperhatikan karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kegiatan usaha dan kehidupan masyarakat.
- Berbagai tekanan ekonomi dunia dapat ikut memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Kenaikan harga minyak dapat meningkatkan biaya impor energi, sedangkan ketidakpastian

pasar global dapat memberikan tekanan terhadap rupiah. Karena itu, pemerintah perlu menjaga kondisi ekonomi dalam negeri agar tekanan dari luar tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap harga barang, kegiatan usaha, dan daya beli masyarakat.

- Target pertumbuhan ekonomi sekitar 6% pada 2027 cukup menantang karena pemerintah juga ingin menjaga defisit APBN tetap rendah. Defisit RAPBN 2027 ditargetkan sebesar 2,40% terhadap PDB, sementara pertumbuhan belanja pemerintah cukup terbatas. Karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu lebih banyak didukung oleh investasi, kredit, BUMN, Danantara, dan kegiatan usaha agar target pertumbuhan dapat tercapai tanpa terlalu membebani APBN.
- Besarnya pembayaran bunga utang membuat pemerintah perlu semakin hati-hati dalam mengelola keuangan negara. Pembayaran bunga utang dalam RAPBN 2027 mencapai Rp650,3 triliun, sehingga mengambil bagian yang cukup besar dari pendapatan negara. Jika beban tersebut terus meningkat, dana yang dapat digunakan untuk kebutuhan pembangunan lainnya menjadi lebih terbatas, sehingga penggunaan anggaran perlu dilakukan secara tepat dan efisien.
- Insentif pajak perlu diberikan kepada sektor yang benar-benar membutuhkan dan memberikan manfaat bagi ekonomi. Belanja perpajakan 2027 diperkirakan mencapai Rp632 triliun, tetapi pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, insentif dapat lebih diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta membantu UMKM dan industri yang banyak menyerap tenaga kerja agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
- Pelemahan rupiah dapat memberikan keuntungan sekaligus menambah beban bagi pemerintah. Rupiah yang melemah dapat meningkatkan nilai penerimaan dari ekspor dan sektor migas, tetapi juga membuat pembayaran utang luar negeri serta biaya subsidi dan impor energi menjadi lebih mahal. Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan ekspor, investasi, devisa hasil ekspor, dan hilirisasi agar pasokan devisa semakin kuat dan tekanan terhadap rupiah dapat dikurangi.
- Naiknya utang luar negeri pemerintah membuat penggunaannya perlu terus diawasi agar memberikan manfaat bagi pembangunan. Utang tersebut digunakan untuk mendukung berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, konstruksi, transportasi, dan kegiatan sosial. Jika digunakan secara tepat, utang dapat membantu pembangunan, tetapi tetap perlu dikelola dengan hati-hati agar pembayaran utang tidak menjadi beban yang terlalu besar bagi keuangan negara.
- Secara umum, Indonesia perlu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kondisi keuangan negara tetap sehat. Pemerintah perlu terus mendorong investasi dan kegiatan usaha, tetapi pada saat yang sama juga harus menjaga defisit APBN, utang, rupiah, dan daya beli masyarakat. Dengan keseimbangan tersebut, Indonesia dapat lebih kuat menghadapi tekanan ekonomi dari luar.
- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,80% menunjukkan bahwa kondisi ekonomi daerah masih cukup baik. Pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan nasional menjadi peluang untuk terus meningkatkan kegiatan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kondisi tersebut tetap perlu dijaga karena tekanan ekonomi global seperti kenaikan harga energi dan pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya usaha di daerah.
- Investasi sebesar Rp59,94 triliun memberikan peluang yang besar untuk membuka lebih banyak lapangan kerja di Jawa Tengah. Investasi tersebut telah menyerap sekitar 213 ribu tenaga kerja, sehingga semakin banyak investasi yang masuk dapat memberikan kesempatan kerja yang lebih luas. Karena itu, pemerintah daerah perlu terus menjaga kemudahan perizinan, keamanan, infrastruktur, dan kualitas tenaga kerja agar investor tetap tertarik masuk ke Jawa Tengah.
- Daya tarik Jawa Tengah sebagai tujuan investasi dapat membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Infrastruktur yang baik, perizinan yang mudah, wilayah yang kondusif, serta biaya hidup yang kompetitif menjadi kelebihan Jawa Tengah dalam menarik investor. Jika investasi diarahkan ke sektor yang banyak membutuhkan tenaga kerja, manfaatnya dapat lebih cepat dirasakan masyarakat melalui terbukanya pekerjaan dan meningkatnya pendapatan.
- Penurunan kemiskinan dan pengangguran menunjukkan adanya perbaikan kondisi masyarakat Jawa Tengah. Angka kemiskinan turun dari 9,48% menjadi 9,21%, sedangkan pengangguran

turun dari 4,33% menjadi 4,24%. Perbaikan tersebut perlu terus dijaga dengan memperluas lapangan kerja dan memastikan pertumbuhan ekonomi serta investasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

- Peningkatan pendidikan dan kesehatan dapat membantu memperbaiki kualitas masyarakat dalam jangka panjang. Upaya membantu anak putus sekolah agar kembali belajar, menciptakan sekolah yang aman, serta memberikan Cek Kesehatan Gratis dan layanan dokter spesialis keliling dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program tersebut juga penting untuk menyiapkan tenaga kerja yang lebih sehat dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
- Investasi menjadi semakin penting karena pembangunan Jawa Tengah tidak dapat hanya bergantung pada APBD. Masuknya investasi dapat membantu pembangunan daerah sekaligus membuka usaha dan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus menawarkan potensi Jawa Tengah kepada investor sambil memastikan bahwa investasi yang masuk memberikan manfaat nyata bagi tenaga kerja, UMK, dan masyarakat sekitar.
- Secara umum, seluruh berita menunjukkan bahwa masalah ekonomi dunia dapat berdampak sampai ke Indonesia dan Jawa Tengah. Kenaikan harga minyak, konflik, inflasi, suku bunga, dan ketidakpastian ekonomi dapat memengaruhi rupiah, APBN, biaya usaha, serta daya beli masyarakat. Karena itu, Indonesia perlu menjaga kondisi keuangan negara dan terus mendorong investasi, sedangkan Jawa Tengah perlu mempertahankan pertumbuhan ekonomi, membuka lebih banyak lapangan kerja, menarik investasi, serta meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Dengan langkah tersebut, tekanan ekonomi dari luar dapat lebih mudah dihadapi dan pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.

Berita Rabu, 19 Agustus

Kesimpulan

Secara keseluruhan, berita pada Rabu, 19 Agustus 2026 menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dunia masih menghadapi banyak ketidakpastian. Tekanan datang dari konflik perdagangan, kebijakan suku bunga, kenaikan imbal hasil obligasi, harga energi, serta konflik geopolitik di Timur Tengah. Di tengah kondisi tersebut, hubungan dagang Amerika Serikat dan Kanada mulai menunjukkan perkembangan yang lebih baik setelah pemerintahan Donald Trump menunda penerapan tarif 50% terhadap sejumlah produk Kanada. Penundaan ini dilakukan karena kedua negara dinilai telah mencapai kemajuan dalam pembicaraan perdagangan, terutama mengenai akses pasar produk Amerika, keamanan ekonomi, dan perdagangan digital. Walaupun Kanada belum menyebut hasil pembicaraan itu sebagai kesepakatan resmi dan beberapa masalah seperti tarif otomotif serta kayu olahan masih belum selesai, langkah tersebut tetap memberikan harapan bahwa ketegangan perdagangan antara kedua negara dapat mereda.

Perkembangan di Amerika Utara tersebut berlangsung bersamaan dengan upaya China menjaga perekonomiannya yang sedang melambat. Pemerintah China memperluas penggunaan dana simpanan perumahan senilai 10,9 triliun yuan agar masyarakat tidak hanya dapat menggunakannya untuk membeli rumah, tetapi juga untuk renovasi dan pembayaran sewa. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat sekaligus membantu sektor properti yang masih mengalami tekanan. Di sisi lain, nilai tukar yuan justru menguat karena dolar AS melemah dan ekspor China masih cukup kuat. Kondisi tersebut membuat prospek yuan dinilai lebih baik, bahkan Bank of America menaikkan perkiraan nilai tukar yuan pada akhir tahun. Namun, pergerakan yuan tetap akan dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga The Fed dan perubahan nilai dolar AS.

Pergerakan yuan tersebut juga menjadi bagian dari perubahan pasar keuangan Asia yang masih tidak merata. Won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Taiwan, dolar Singapura, dan yuan mengalami penguatan, sedangkan beberapa mata uang lain masih melemah, termasuk rupiah pada awal perdagangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa investor masih sangat berhati-hati karena menunggu arah kebijakan The Fed, memperhatikan kenaikan imbal hasil obligasi global, serta mencermati konflik Timur Tengah yang dapat mendorong harga minyak lebih tinggi. Bagi negara seperti Indonesia yang masih membutuhkan impor energi dalam jumlah besar, kenaikan harga minyak dapat menambah kebutuhan valuta asing dan memberi tekanan terhadap rupiah. Karena itu, pergerakan mata uang Asia ke depan akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga Amerika Serikat, harga energi, pergerakan dolar, serta kondisi geopolitik dunia.

Tekanan global juga terlihat di Jepang dan Australia, meskipun masalah yang dihadapi berbeda. Di Jepang, imbal hasil obligasi pemerintah meningkat mendekati 3% karena pasar mulai mengkhawatirkan inflasi, kondisi fiskal, besarnya utang pemerintah, serta kemungkinan Bank of Japan menaikkan suku bunga. Jika imbal hasil obligasi Jepang semakin tinggi, investor Jepang bisa memilih membawa kembali dananya dari luar negeri sehingga dapat memengaruhi aliran modal global. Sementara itu, Australia mengalami perlambatan pertumbuhan upah. Upah naik 0,8% pada kuartal II 2026 dan tumbuh 3,2% secara tahunan. Perlambatan upah dapat membantu mengurangi tekanan inflasi dan biaya perusahaan, tetapi di sisi lain dapat membatasi daya beli masyarakat apabila kenaikan penghasilan tidak mampu mengikuti kenaikan biaya hidup.

Berbagai tekanan dari luar tersebut kemudian menjadi perhatian penting bagi Indonesia, terutama karena kondisi global dapat memengaruhi rupiah, inflasi, dan aliran modal asing. Untuk menjaga kestabilan ekonomi, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di level 5,75%, Deposit Facility sebesar 4,75%, dan Lending Facility sebesar 6,50%. Keputusan ini diambil untuk menjaga nilai tukar rupiah dari gejolak global, mempertahankan inflasi dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2026 dan 2027, serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain menahan suku bunga, BI juga memperkuat intervensi di pasar valuta asing, menjaga kecukupan likuiditas, memperluas fasilitas lindung nilai, serta memperkuat kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran digital. Dengan cara tersebut, BI berusaha menjaga stabilitas tanpa terlalu menekan kegiatan ekonomi di dalam negeri.

Kebijakan BI tersebut didukung oleh beberapa perkembangan yang cukup positif. Rupiah berhasil ditutup menguat menjadi Rp17.833 per dolar AS setelah keputusan suku bunga diumumkan, walaupun secara keseluruhan rupiah masih mengalami tekanan sepanjang tahun. Di sisi lain, aliran modal asing secara bersih tercatat masuk sebesar US\$1,8 miliar hingga pertengahan Agustus, sementara cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli mencapai US\$145,3 miliar. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain itu, uang primer tumbuh tinggi sebesar 18,3% pada Juli dan uang beredar luas juga masih tumbuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki cadangan devisa dan likuiditas yang cukup untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Likuiditas yang cukup tersebut kemudian diarahkan untuk mendukung penyaluran kredit kepada masyarakat dan dunia usaha. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial dari BI telah mencapai Rp446,5 triliun pada minggu pertama Agustus, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Kebijakan ini ikut mendorong pertumbuhan kredit perbankan menjadi 13,58% pada Juli 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Juni. Kondisi perbankan juga masih cukup kuat karena rasio kecukupan modal tetap tinggi dan kredit bermasalah masih rendah. Artinya, perbankan masih memiliki kemampuan yang baik untuk menyalurkan pembiayaan tanpa mengabaikan risiko. Dengan demikian, kebijakan BI diharapkan tidak hanya menjaga likuiditas di pasar keuangan, tetapi juga benar-benar membantu sektor usaha dan sektor prioritas agar terus berkembang.

Meskipun kondisi perbankan cukup kuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap perlu ditopang oleh sumber yang lebih luas. Bank Indonesia menilai konsumsi masyarakat dan ekspor masih perlu

terus ditingkatkan karena pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026 sebesar 5,29% masih banyak didukung oleh stimulus pemerintah, konsumsi pemerintah, dan investasi. Untuk keseluruhan 2026, BI memperkirakan ekonomi tumbuh antara 4,9% hingga 5,7%. Oleh karena itu, pertumbuhan tidak dapat terus bergantung pada belanja pemerintah, tetapi juga harus didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi swasta, ekspor, dan kredit produktif. Di sisi lain, inflasi Juli turun menjadi 2,88% secara tahunan sehingga masih berada dalam sasaran BI, walaupun risiko dari harga energi, pelemahan rupiah, kondisi cuaca, dan harga pangan tetap perlu diperhatikan.

Di tengah upaya menjaga pertumbuhan tersebut, pemerintah juga menghadapi tantangan dari sisi fiskal. Dalam RAPBN 2027, pemerintah berencana menarik pembiayaan utang sebesar Rp876,3 triliun, dengan sumber terbesar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara. Pada saat yang sama, struktur utang luar negeri Indonesia juga mulai berubah karena porsi utang dalam yuan meningkat cukup cepat. Diversifikasi mata uang memang dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan memperluas sumber pembiayaan, tetapi risiko nilai tukar tetap harus diperhatikan. Tantangan menjadi lebih besar karena pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027, sementara keseimbangan primer masih diproyeksikan defisit Rp20,9 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah harus mencari keseimbangan antara kebutuhan belanja untuk mendorong ekonomi dan kewajiban menjaga kesehatan fiskal agar beban utang tidak semakin besar.

Tantangan di tingkat nasional tersebut kemudian terlihat lebih nyata ketika dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di Jawa Tengah. Investasi di Jawa Tengah terus diarahkan agar tidak hanya meningkatkan nilai penanaman modal, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Realisasi investasi pada semester I 2026 dalam catatan DPMPTSP mencapai Rp48,54 triliun dan mampu menyerap lebih dari 213 ribu tenaga kerja dari puluhan ribu proyek. Pada saat yang sama, jumlah penduduk yang bekerja meningkat, sedangkan jumlah penduduk miskin turun menjadi sekitar 3,29 juta orang atau 9,21%. Perekonomian Jawa Tengah juga tumbuh 5,71% pada kuartal II 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa investasi mulai memberikan dampak langsung kepada masyarakat, salah satunya melalui kawasan industri di Batang yang membuka kesempatan kerja setelah masyarakat mendapatkan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Selain mendorong investasi dan lapangan kerja, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mulai menggunakan pendekatan baru dalam mengurangi kemiskinan. Melalui Pilot Project Desa/Kelurahan Mandiri Sejahtera Berbasis Pemberdayaan Pemuda, pemerintah menjadikan pemuda dari keluarga miskin sebagai salah satu sasaran utama. Program ini tidak hanya memberikan bantuan, tetapi dimulai dengan asesmen, pelatihan, pendampingan, dan dukungan usaha agar bantuan dapat berkembang menjadi sumber pendapatan. Dukungan yang diberikan meliputi modal usaha, pelatihan keterampilan, Kartu Zilenial, bantuan pendidikan, jaminan sosial, perbaikan rumah, sanitasi, sambungan listrik, hingga pengembangan usaha produktif. Dengan pendekatan tersebut, pemuda diharapkan tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi keluarga dan membantu keluarganya keluar dari kemiskinan.

Pada akhirnya, seluruh berita dari tingkat internasional, Indonesia, hingga Jawa Tengah menunjukkan bahwa kondisi ekonomi saling berhubungan satu sama lain. Ketegangan perdagangan, kebijakan suku bunga dunia, konflik Timur Tengah, harga minyak, dan pergerakan pasar keuangan dapat langsung memengaruhi rupiah, inflasi, investasi, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia berusaha menjaga stabilitas melalui kebijakan suku bunga, pengendalian rupiah, penyediaan likuiditas, penyaluran kredit, dan pengelolaan fiskal. Di tingkat daerah, kebijakan tersebut perlu diteruskan melalui investasi yang membuka lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Jawa Tengah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih berarti jika manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pekerjaan, pendapatan, pelayanan dasar, dan berkurangnya

kemiskinan. Dengan demikian, keberhasilan ekonomi tidak hanya dilihat dari tingginya angka pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Ringkasan

- Hubungan perdagangan Amerika Serikat dan Kanada mulai membaik setelah AS menunda rencana tarif 50% terhadap sejumlah barang dari Kanada. Penundaan dilakukan karena kedua negara mulai mencapai kemajuan dalam perundingan perdagangan. Namun, beberapa masalah seperti tarif otomotif dan kayu olahan masih perlu diselesaikan, sehingga pembicaraan kedua negara masih akan berlanjut.
- China masih berusaha memperkuat kondisi ekonominya, terutama karena konsumsi masyarakat dan sektor properti masih menghadapi tekanan. Di tengah kondisi tersebut, yuan China menguat karena dolar AS melemah dan ekspor China masih cukup baik. Bank of America juga memperkirakan yuan dapat semakin kuat, meskipun pergerakannya tetap bergantung pada kebijakan suku bunga The Fed dan kondisi ekonomi global.
- Pergerakan mata uang Asia masih berbeda-beda, dengan won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Taiwan, dolar Singapura, dan yuan mengalami penguatan, sedangkan beberapa mata uang lainnya masih melemah. Rupiah juga masih menghadapi tekanan karena investor terus memperhatikan kebijakan The Fed, kenaikan imbal hasil obligasi, serta kondisi ekonomi dan politik dunia.
- Konflik di Timur Tengah juga menjadi perhatian karena dapat mendorong harga minyak naik. Kondisi ini dapat memberikan tekanan lebih besar kepada negara yang banyak mengimpor energi, termasuk Indonesia. Karena itu, pergerakan mata uang dan ekonomi Asia ke depan masih akan dipengaruhi oleh harga minyak, kebijakan The Fed, pergerakan dolar AS, dan perkembangan konflik global.
- Sementara itu, pertumbuhan upah di Australia mulai melambat dan tercatat sebesar 3,2% secara tahunan. Perlambatan ini dapat membantu mengurangi tekanan inflasi dan biaya perusahaan, tetapi juga dapat menekan daya beli masyarakat jika pendapatan mereka tidak mampu mengikuti kenaikan biaya hidup.
- Di tengah ketidakpastian global tersebut, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate sebesar 5,75%. Deposit Facility juga tetap 4,75% dan Lending Facility sebesar 6,50%. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga rupiah, mengendalikan inflasi, dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tekanan ekonomi global dan konflik Timur Tengah.
- BI juga terus memperkuat kebijakan untuk menjaga rupiah dan memastikan likuiditas tetap tersedia. Selain menjaga kondisi pasar keuangan, BI mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor prioritas dan memperkuat pembayaran digital. Salah satunya melalui Kartu Kredit Indonesia serta rencana penerapan MDR QRIS 0% untuk transaksi sampai Rp100.000 mulai Oktober 2026.
- Likuiditas dalam perekonomian Indonesia masih cukup kuat, terlihat dari uang primer yang tumbuh 18,3% pada Juli 2026. Uang beredar luas juga masih mengalami pertumbuhan, sehingga dana yang tersedia di perbankan dan perekonomian masih cukup untuk mendukung kegiatan masyarakat dan dunia usaha.
- Likuiditas yang cukup tersebut ikut mendukung pertumbuhan kredit perbankan. Insentif likuiditas dari BI mencapai Rp446,5 triliun pada awal Agustus, sedangkan kredit perbankan tumbuh 13,58% pada Juli 2026. Dengan kondisi tersebut, BI berharap perbankan semakin aktif memberikan kredit kepada sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Kondisi perbankan Indonesia juga masih cukup sehat, karena modal perbankan tetap kuat dan tingkat kredit bermasalah masih rendah. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi bank untuk

terus meningkatkan pembiayaan kepada masyarakat dan dunia usaha, tetapi tetap harus memperhatikan risiko agar stabilitas perbankan tetap terjaga.

- Aliran modal asing juga mulai memberikan dukungan terhadap perekonomian Indonesia. Hingga 14 Agustus 2026, aliran investasi portofolio asing yang masuk secara bersih mencapai US\$1,8 miliar. Sementara itu, cadangan devisa pada akhir Juli mencapai US\$145,3 miliar, sehingga masih cukup kuat untuk membantu memenuhi kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
- Walaupun kondisi keuangan masih cukup baik, konsumsi masyarakat dan ekspor tetap perlu ditingkatkan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada kuartal II 2026 dan banyak didukung oleh stimulus pemerintah, konsumsi pemerintah, serta investasi. Karena itu, pertumbuhan berikutnya perlu lebih banyak didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi swasta, ekspor, dan kegiatan usaha agar tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah.
- Inflasi Indonesia juga masih terkendali, dengan inflasi Juli 2026 sebesar 2,88%, turun dari 3,34% pada bulan sebelumnya. Meski demikian, BI tetap perlu menjaga rupiah dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengendalikan harga pangan karena masih terdapat risiko dari harga energi, kondisi cuaca, dan tekanan ekonomi global.
- Dari sisi anggaran negara, pemerintah masih membutuhkan pembiayaan utang yang cukup besar pada 2027. Pemerintah berencana menarik utang sebesar Rp876,3 triliun dan sebagian besar berasal dari penerbitan SBN. Pembiayaan tersebut perlu dikelola dengan hati-hati agar dapat mendukung program pemerintah tanpa membuat beban fiskal semakin berat.
- Tantangan fiskal semakin besar karena pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027, sedangkan keseimbangan primer masih diperkirakan defisit Rp20,9 triliun. Karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan belanja pemerintah, tetapi perlu didukung oleh investasi, konsumsi masyarakat, ekspor, dan kegiatan usaha swasta yang lebih kuat.
- Di Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi mulai memberikan dampak terhadap lapangan kerja dan penurunan kemiskinan. Ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,71% pada kuartal II 2026, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja mencapai sekitar 21,40 juta orang. Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin turun menjadi sekitar 3,29 juta orang atau 9,21%, sehingga pertumbuhan ekonomi mulai berjalan bersama dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
- Investasi menjadi salah satu faktor yang membantu perkembangan ekonomi Jawa Tengah. Dalam salah satu catatan DPMPTSP pada berita tersebut, investasi semester I 2026 mencapai Rp48,54 triliun dari 55.989 proyek dan menyerap lebih dari 213 ribu tenaga kerja. Pemerintah juga terus mengembangkan kawasan industri agar investasi semakin banyak membuka pekerjaan bagi masyarakat.
- Manfaat investasi dapat dilihat dari masyarakat yang berhasil mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti pelatihan. Di Batang, Ikmal dan Sella mendapatkan pekerjaan di perusahaan alas kaki setelah memperoleh pelatihan keterampilan. Penghasilan dari pekerjaan tersebut kemudian dapat digunakan untuk membantu kebutuhan keluarga, sehingga investasi dan pelatihan tenaga kerja dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
- Pemprov Jawa Tengah juga menggunakan pemberdayaan pemuda sebagai salah satu cara mengurangi kemiskinan. Pemuda dari keluarga kurang mampu diberikan pelatihan dan pendampingan sebelum menerima bantuan usaha. Cara ini dilakukan agar bantuan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sementara, tetapi dapat berkembang menjadi usaha dan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan bagi keluarga.
- Program tersebut dilengkapi dengan berbagai bantuan ekonomi dan sosial, seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, Kartu Zilenial, bantuan pendidikan, jaminan sosial, perbaikan rumah, jamban, sambungan listrik, dan bantuan usaha produktif. Dengan bantuan yang saling mendukung tersebut, pemerintah berusaha menangani kemiskinan dari berbagai sisi, mulai dari pekerjaan dan pendapatan hingga pendidikan dan kebutuhan dasar keluarga.

- Pembangunan daerah juga diperkuat melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Perubahan APBD 2026 diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, jalan, drainase, penerangan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Selain itu, kerja sama antardesa dan pengembangan komoditas unggulan juga didorong agar pembangunan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Implikasi

- Membaiknya hubungan perdagangan Amerika Serikat dan Kanada dapat mengurangi ketegangan ekonomi antara kedua negara. Penundaan tarif 50% memberikan waktu bagi AS dan Kanada untuk melanjutkan perundingan. Jika kesepakatan dapat tercapai, kegiatan perdagangan dan investasi akan menjadi lebih stabil. Namun, masalah tarif otomotif dan kayu masih perlu diselesaikan sehingga risiko perselisihan tetap ada.
- Upaya China memperkuat ekonominya dapat membantu menjaga pertumbuhan ekonomi di Asia. Penguatan yuan dan ekspor China yang masih cukup baik menjadi perkembangan positif bagi perekonomian negara tersebut. Namun, kondisi China tetap dipengaruhi oleh perubahan dolar AS dan kebijakan suku bunga The Fed, sehingga perkembangan ekonomi global masih perlu diperhatikan.
- Pergerakan mata uang Asia yang berbeda-beda menunjukkan bahwa pasar keuangan masih belum stabil. Beberapa mata uang mengalami penguatan, sedangkan mata uang lainnya termasuk rupiah masih menghadapi tekanan. Kondisi ini membuat investor lebih berhati-hati karena pergerakan mata uang masih dipengaruhi oleh suku bunga Amerika Serikat, imbal hasil obligasi, dan kondisi ekonomi dunia.
- Konflik di Timur Tengah dapat membuat harga minyak kembali meningkat. Jika harga minyak naik, negara yang banyak mengimpor energi seperti Indonesia dapat menghadapi biaya impor yang lebih besar. Kondisi tersebut juga dapat menekan nilai tukar dan meningkatkan biaya produksi, sehingga pada akhirnya harga barang di dalam negeri dapat ikut naik.
- Perlambatan pertumbuhan upah di Australia dapat membantu mengurangi tekanan inflasi. Biaya tenaga kerja perusahaan dapat menjadi lebih terkendali sehingga kenaikan harga dapat berkurang. Namun, jika pendapatan masyarakat tumbuh terlalu lambat, daya beli dan konsumsi masyarakat juga dapat ikut melemah.
- Keputusan Bank Indonesia mempertahankan BI Rate sebesar 5,75% dapat membantu menjaga kestabilan rupiah dan inflasi. Kebijakan ini diperlukan karena kondisi ekonomi dunia masih tidak pasti. Di sisi lain, BI tetap berusaha menjaga agar suku bunga tidak terlalu membatasi kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
- Kebijakan BI untuk menjaga rupiah dan likuiditas dapat memperkuat ekonomi Indonesia dalam menghadapi tekanan global. Ketersediaan dana di perbankan perlu tetap dijaga agar bank dapat terus memberikan kredit. Dengan begitu, dunia usaha tetap memperoleh pembiayaan untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya.
- Pertumbuhan uang primer sebesar 18,3% menunjukkan bahwa likuiditas dalam perekonomian masih cukup besar. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi perbankan untuk meningkatkan pembiayaan. Jika dana tersebut disalurkan ke kegiatan yang produktif, investasi, produksi, dan kegiatan usaha dapat meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi ikut terdorong.
- Insentif likuiditas BI sebesar Rp446,5 triliun dapat membantu meningkatkan penyaluran kredit. Hal ini terlihat dari pertumbuhan kredit perbankan yang mencapai 13,58% pada Juli 2026. Semakin banyak kredit yang disalurkan ke sektor produktif, semakin besar pula peluang usaha untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja.
- Kondisi perbankan yang masih sehat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Modal bank masih cukup kuat, likuiditas tersedia, dan kredit bermasalah masih relatif rendah.

Kondisi ini membuat bank memiliki ruang untuk terus memberikan pembiayaan kepada masyarakat dan dunia usaha dengan tetap memperhatikan risiko.

- Masuknya modal asing dapat membantu menjaga kestabilan rupiah dan pasar keuangan. Aliran modal asing bersih mencapai US\$1,8 miliar hingga pertengahan Agustus, sementara cadangan devisa mencapai US\$145,3 miliar. Cadangan devisa yang cukup besar memberikan kekuatan bagi Indonesia untuk menghadapi tekanan ekonomi dari luar.
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu lebih banyak didukung oleh konsumsi, investasi, dan ekspor. Pertumbuhan ekonomi kuartal II sebesar 5,29% masih banyak dibantu oleh stimulus pemerintah. Karena itu, konsumsi masyarakat, investasi swasta, ekspor, dan kegiatan usaha perlu terus meningkat agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih kuat dan tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah.
- Inflasi yang turun menjadi 2,88% dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Namun, risiko kenaikan harga masih ada karena harga minyak, kondisi cuaca, harga pangan, dan pelemahan rupiah dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itu, BI dan pemerintah perlu terus bekerja sama menjaga harga agar kebutuhan masyarakat tetap terjangkau.
- Rencana pemerintah menarik utang Rp876,3 triliun pada 2027 dapat membantu membiayai berbagai program pemerintah. Namun, utang tersebut harus digunakan dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu menjaga agar pembayaran utang tidak semakin membebani anggaran negara.
- Target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 akan cukup menantang karena kondisi anggaran pemerintah masih terbatas. Keseimbangan primer masih diperkirakan defisit Rp20,9 triliun, sehingga pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan belanja negara. Investasi swasta, konsumsi masyarakat, ekspor, dan kegiatan usaha perlu diperkuat agar target pertumbuhan lebih mudah dicapai.
- Pengembangan pembayaran digital dapat mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha. Kartu Kredit Indonesia dan rencana MDR QRIS 0% untuk transaksi sampai Rp100.000 dapat membantu menekan biaya transaksi. Kebijakan ini juga dapat membantu UMKM menggunakan pembayaran digital dengan lebih mudah dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika terus diikuti dengan penciptaan lapangan kerja. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dan penurunan kemiskinan menunjukkan adanya perkembangan yang positif. Namun, manfaat pertumbuhan perlu terus diperluas agar dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Jawa Tengah.
- Investasi yang masuk ke Jawa Tengah dapat membuka lebih banyak lapangan kerja. Investasi semester I 2026 dalam catatan DPMPSTSP mencapai Rp48,54 triliun dan menyerap lebih dari 213 ribu tenaga kerja. Karena itu, pemerintah perlu terus menarik investasi sekaligus menyiapkan tenaga kerja lokal agar masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan industri.
- Pelatihan keterampilan dapat membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan dari masuknya investasi. Pengalaman Ikmal dan Sella di Batang menunjukkan bahwa pelatihan dapat membantu tenaga kerja memenuhi kebutuhan perusahaan. Karena itu, pembangunan kawasan industri perlu diikuti dengan semakin banyak pelatihan agar masyarakat lokal memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan.
- Pemberdayaan pemuda dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan. Pemuda dari keluarga kurang mampu diberikan pelatihan, pendampingan, dan bantuan usaha agar mereka memiliki keterampilan dan penghasilan. Dengan cara tersebut, pemuda diharapkan dapat membantu ekonomi keluarganya dan tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.
- Bantuan sosial yang digabungkan dengan bantuan usaha dapat membuat penanganan kemiskinan lebih lengkap. Masyarakat mendapatkan dukungan berupa modal usaha,

pendidikan, perbaikan rumah, sanitasi, listrik, dan berbagai bantuan lainnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan adanya kesempatan memperoleh penghasilan, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kehidupannya.

- Penurunan kemiskinan menjadi 9,21% menunjukkan perkembangan yang baik, tetapi program pengentasan kemiskinan tetap harus dilanjutkan. Penciptaan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pemberdayaan usaha perlu berjalan bersama. Dengan begitu, masyarakat yang sudah keluar dari kemiskinan dapat memiliki penghasilan yang lebih stabil dan tidak kembali mengalami kesulitan ekonomi.
- Pembangunan infrastruktur di Purbalingga dapat membantu memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Perbaikan jalan, drainase, penerangan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan dapat meningkatkan kondisi masyarakat sekaligus memperbaiki hubungan antarwilayah. Infrastruktur yang semakin baik juga dapat mempermudah masyarakat membawa hasil produksi dan menjualnya ke pasar.
- Pengembangan ekonomi desa dapat menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Program satu kecamatan satu komoditas dapat membantu setiap wilayah mengembangkan produk unggulannya. Jika didukung dengan modal, pasar, infrastruktur, dan peningkatan keterampilan, kegiatan ekonomi desa dapat berkembang dan manfaat pembangunan menjadi lebih merata.

Berita Kamis, 20 Agustus

Kesimpulan

Secara keseluruhan, berita internasional pada 20 Agustus 2026 menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dunia masih menghadapi tekanan yang cukup besar. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah Presiden Donald Trump mengumumkan tekanan ekonomi dalam skala besar terhadap Iran. Tekanan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Iran, tetapi juga dapat berdampak pada negara, perusahaan, lembaga keuangan, maupun pihak lain yang tetap membantu Iran. Situasi ini membuat ketidakpastian global semakin tinggi karena dapat memengaruhi perdagangan, investasi, pergerakan modal, serta harga berbagai komoditas dunia.

Di tengah ketegangan tersebut, Amerika Serikat juga menghadapi persoalan besar dari dalam negeri setelah utang pemerintah menembus sekitar US\$40,047 triliun. Besarnya utang ini menunjukkan bahwa beban fiskal AS terus meningkat akibat tingginya belanja pemerintah, program jaminan sosial, serta pembayaran bunga utang. Kondisi tersebut semakin berat karena pembayaran bunga terus membesar dan mengurangi ruang pemerintah untuk membiayai kebutuhan lain. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa perbaikan penerimaan dan pengeluaran, kemampuan pemerintah AS untuk menghadapi perlambatan ekonomi atau krisis baru juga akan semakin terbatas.

Tekanan global itu kemudian terlihat pada kondisi ekonomi beberapa negara Asia. Malaysia masih mencatat kinerja perdagangan yang kuat, sedangkan China memilih mempertahankan suku bunga acuannya dan lebih mengandalkan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan. India juga berusaha memperbaiki pasar modal agar kembali menarik bagi investor asing. Sementara itu, Jepang menghadapi kenaikan impor akibat tingginya harga energi, terutama minyak, tetapi ekspornya tetap tumbuh kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap negara menghadapi tantangan yang berbeda, tetapi semuanya tetap dipengaruhi oleh ketidakpastian global, pergerakan harga energi, serta perubahan arus perdagangan dan investasi.

Perkembangan tersebut juga memengaruhi pasar keuangan dan kebijakan suku bunga di kawasan. Mayoritas mata uang Asia sempat menguat terhadap dolar AS, termasuk rupiah, meskipun

sepanjang 2026 rupiah masih termasuk mata uang yang cukup tertekan. Di Australia, tingkat pengangguran naik menjadi 4,5% dan menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja mulai melemah. Kondisi ini membuat tekanan terhadap Reserve Bank of Australia untuk kembali menaikkan suku bunga menjadi lebih kecil. Dari sini terlihat bahwa kebijakan bank sentral di berbagai negara masih sangat bergantung pada perkembangan inflasi, tenaga kerja, nilai tukar, dan kondisi ekonomi global.

Tekanan dari luar negeri tersebut kemudian berhubungan langsung dengan kondisi Indonesia. Bank Indonesia memilih mempertahankan BI Rate di level 5,75%, Deposit Facility sebesar 4,75%, dan Lending Facility sebesar 6,50%. Keputusan ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas rupiah, pengendalian inflasi, dan kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah ini menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dari 5,61% pada kuartal I menjadi 5,29% pada kuartal II 2026. Dengan demikian, BI berusaha agar kebijakan moneter tetap cukup kuat menjaga stabilitas, tetapi tidak terlalu ketat sehingga dapat menekan kegiatan ekonomi.

Untuk menjaga rupiah tanpa hanya mengandalkan kenaikan suku bunga, BI juga memperkuat intervensi valuta asing, menjaga likuiditas, dan memperluas fasilitas lindung nilai. Fasilitas ini tidak hanya digunakan untuk investasi portofolio, tetapi juga diperluas untuk pinjaman luar negeri perbankan dan investasi langsung asing atau FDI. Pada saat yang sama, BI tetap mendorong penyaluran kredit melalui kebijakan makroprudensial yang lebih longgar. Hasilnya, kredit perbankan pada Juli 2026 tumbuh 13,58% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa BI berusaha menjaga stabilitas nilai tukar sambil tetap memberikan ruang bagi dunia usaha dan masyarakat untuk memperoleh pembiayaan.

Upaya tersebut ikut terlihat pada pergerakan rupiah yang ditutup menguat menjadi sekitar Rp17.746 per dolar AS. Penguatan ini didukung oleh melemahnya dolar AS dan membaiknya kondisi pasar obligasi. Selain itu, imbal hasil Surat Utang Negara juga menjadi lebih menarik bagi investor. Namun, kondisi rupiah tetap harus dijaga karena harga minyak masih tinggi dan dapat meningkatkan tekanan terhadap inflasi serta kebutuhan devisa. Karena itu, kestabilan rupiah masih sangat bergantung pada kebijakan BI, kepercayaan investor, dan kondisi pasar global.

Selain kebijakan moneter, perkembangan ekonomi Indonesia juga terlihat dari semakin luasnya penggunaan transaksi digital. Transaksi melalui internet, aplikasi mobile, QRIS, dan BI-FAST terus mengalami pertumbuhan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat semakin terhubung dengan sistem pembayaran digital. Namun, di sisi fiskal, pemerintah juga menghadapi tantangan besar melalui RAPBN 2027. Anggaran subsidi energi direncanakan naik menjadi sekitar Rp272,9 triliun, termasuk subsidi BBM, LPG 3 kilogram, dan listrik. Kenaikan tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat, tetapi pemerintah tetap perlu memperbaiki ketepatan sasaran agar subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Tantangan fiskal semakin terlihat karena belanja rutin dan kewajiban pemerintah meningkat, sedangkan belanja modal justru menurun. Belanja modal dalam RAPBN 2027 diperkirakan turun menjadi sekitar Rp295,2 triliun, sementara belanja pegawai dan pembayaran bunga utang meningkat. Kondisi ini menjadi perhatian karena belanja modal berperan penting dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan kegiatan produktif lainnya. Jika belanja yang langsung mendorong kapasitas ekonomi terus berkurang, maka target pertumbuhan ekonomi mendekati 6% pada 2027 akan semakin sulit dicapai. Oleh karena itu, kualitas penggunaan anggaran menjadi sangat penting agar setiap rupiah belanja benar-benar memberikan manfaat bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi nasional tersebut kemudian berkaitan dengan perkembangan di Jawa Tengah, terutama dalam hal investasi dan lapangan kerja. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar job fair yang menyediakan 4.817 lowongan pekerjaan dari berbagai sektor, termasuk manufaktur, pertanian, makanan, kesehatan, keuangan, pariwisata, perhotelan, dan ritel. Kegiatan ini penting karena jumlah

angkatan kerja Jawa Tengah terus bertambah. Pada Februari 2026, jumlah angkatan kerja mencapai 22,33 juta orang, sedangkan investasi Jawa Tengah pada semester pertama 2026 mencapai Rp59,94 triliun dan menyerap lebih dari 213 ribu tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dan penciptaan lapangan kerja harus terus berjalan bersama agar pertumbuhan ekonomi daerah benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain masalah ketenagakerjaan, Jawa Tengah juga masih menghadapi persoalan kemiskinan dan pembangunan desa. Desa Kepyar di Wonogiri dijadikan contoh pendekatan baru dalam pengentasan kemiskinan dengan melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, BUMD, Baznas, dan berbagai lembaga lainnya. Pendekatan tersebut tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga mendorong penguatan pertanian, UMKM, literasi keuangan, dan potensi wisata. Dengan cara ini, masyarakat diharapkan tidak hanya terbantu dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki sumber pendapatan yang lebih kuat agar tidak kembali masuk dalam kemiskinan.

Pada akhirnya, seluruh berita dari tingkat internasional, Indonesia, hingga Jawa Tengah menunjukkan hubungan yang saling berkaitan. Ketegangan global, tingginya utang AS, harga energi, dan perubahan kebijakan ekonomi dunia dapat memengaruhi nilai tukar, inflasi, investasi, dan kebijakan pemerintah Indonesia. Dampaknya kemudian terasa hingga tingkat daerah melalui lapangan kerja, pembangunan desa, kondisi petani, dan kesejahteraan masyarakat. Di Jawa Tengah, hal ini terlihat dari upaya membuka lebih banyak kesempatan kerja, memperkuat investasi, mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan, serta menghadapi masalah petani garam di Rembang yang produksinya meningkat tetapi harganya justru turun hingga sekitar Rp650–Rp700 per kilogram. Karena itu, kebijakan dari pusat sampai daerah perlu saling mendukung agar stabilitas ekonomi tetap terjaga dan hasil pertumbuhan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.

Ringkasan

- Ketegangan Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah Presiden Donald Trump mengumumkan operasi tekanan dan isolasi ekonomi dalam skala besar terhadap Iran. Kebijakan tersebut juga dapat menyasar negara, perusahaan, lembaga keuangan, bandara, maupun pihak lain yang tetap memberikan bantuan kepada Iran, sehingga situasi ini dapat memperbesar ketidakpastian perdagangan, investasi, dan perekonomian global.
- Tekanan geopolitik tersebut terjadi ketika Amerika Serikat sendiri menghadapi persoalan fiskal yang semakin berat, karena utang pemerintah untuk pertama kalinya menembus US\$40 triliun dan mencapai sekitar US\$40,047 triliun. Kenaikan utang dipengaruhi oleh besarnya kebutuhan belanja pemerintah, program jaminan sosial, kebijakan fiskal selama beberapa pemerintahan, serta ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara.
- Besarnya utang AS juga membuat pembayaran bunga semakin membebani anggaran, dengan sekitar US\$1,1 triliun digunakan untuk membayar bunga utang. Dalam sepuluh bulan pertama tahun fiskal 2026, pembayaran bunga bahkan telah melampaui pengeluaran Medicare dan menjadi pos belanja terbesar kedua setelah Social Security, sehingga ruang fiskal AS untuk menghadapi perlambatan ekonomi atau krisis baru menjadi semakin terbatas.
- Tekanan global juga terlihat dari persoalan energi yang dihadapi Jepang, karena tingginya harga minyak dan gangguan pasokan dari Timur Tengah membuat nilai impor meningkat. Jepang mulai lebih banyak menggunakan pasokan alternatif, terutama dari Amerika Serikat, sementara harga energi yang tinggi ikut meningkatkan biaya produksi dan tekanan inflasi, dengan harga produsen Jepang pada Juli 2026 meningkat 7,2% secara tahunan.
- Meski menghadapi kenaikan biaya impor, perdagangan Jepang masih memperoleh dukungan dari ekspor yang kuat, karena ekspor Juli 2026 meningkat 23,2% secara tahunan menjadi 11,5 triliun yen. Kondisi ini menunjukkan bahwa permintaan luar negeri masih membantu menopang ekonomi Jepang, walaupun permintaan domestik dan tingginya biaya energi tetap menjadi tantangan.

- Perubahan kondisi global kemudian ikut memengaruhi pasar keuangan Asia, dengan mayoritas mata uang kawasan menguat terhadap dolar AS setelah tekanan pada imbal hasil obligasi pemerintah AS mereda. Ringgit Malaysia menjadi salah satu penguat terbesar, sedangkan rupiah juga menguat, meskipun sepanjang 2026 rupiah masih termasuk mata uang Asia yang mengalami tekanan cukup besar.
- Di Australia, kondisi pasar tenaga kerja mulai menunjukkan pelemahan setelah tingkat pengangguran meningkat menjadi 4,5%, tertinggi sejak akhir 2021. Keadaan tersebut membuat tekanan terhadap Reserve Bank of Australia untuk kembali menaikkan suku bunga menjadi lebih kecil, walaupun arah kebijakan selanjutnya tetap bergantung pada perkembangan inflasi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.
- Di tengah ketidakpastian global tersebut, Bank Indonesia memilih mempertahankan BI Rate sebesar 5,75%, bersama Deposit Facility sebesar 4,75% dan Lending Facility sebesar 6,50%. Keputusan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah dan inflasi sekaligus tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi, terutama karena pertumbuhan Indonesia melambat dari 5,61% pada kuartal I menjadi 5,29% pada kuartal II 2026.
- BI juga tetap menjaga pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan likuiditas dan makroprudensial yang longgar, sehingga kredit perbankan pada Juli 2026 tumbuh 13,58% secara tahunan, meningkat dari 12,67% pada Juni. Insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial yang diterima perbankan hingga minggu pertama Agustus juga telah mencapai Rp446,5 triliun, sehingga perbankan tetap memiliki ruang untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor riil.
- Untuk menjaga rupiah tanpa hanya mengandalkan kenaikan suku bunga, BI memperkuat berbagai instrumen stabilisasi, termasuk intervensi valuta asing serta perluasan fasilitas swap lindung nilai untuk pinjaman luar negeri perbankan dan investasi langsung asing. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga masuknya dana asing, mengurangi risiko perubahan nilai tukar, serta mendukung stabilitas pasar keuangan domestik.
- Upaya menjaga stabilitas tersebut terlihat dari penguatan rupiah pada perdagangan 20 Agustus, ketika rupiah ditutup naik sekitar 0,49% menjadi Rp17.746 per dolar AS dan menjadi salah satu mata uang dengan penguatan terbesar di Asia. Penguatan tersebut didukung pelemahan dolar AS dan membaiknya pasar obligasi, meskipun harga minyak Brent yang masih tinggi tetap menjadi risiko bagi inflasi dan kebutuhan devisa Indonesia.
- Dari sisi fiskal, pemerintah menghadapi kenaikan kebutuhan subsidi energi dalam RAPBN 2027, dengan anggaran mencapai Rp272,9 triliun atau meningkat 20,1% dibandingkan outlook APBN 2026. Subsidi BBM dan LPG 3 kilogram direncanakan sebesar Rp142,8 triliun, sedangkan subsidi listrik mencapai Rp130,1 triliun, sehingga pemerintah berencana memperbaiki ketepatan penyalurannya melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
- Pada saat subsidi dan sejumlah kewajiban meningkat, ruang anggaran untuk belanja produktif justru semakin terbatas, karena belanja modal RAPBN 2027 turun hampir 20% menjadi sekitar Rp295,2 triliun. Penurunan ini perlu diperhatikan karena belanja modal berhubungan langsung dengan pembangunan infrastruktur, konektivitas, pendidikan, kesehatan, teknologi, ketahanan pangan dan energi, serta berbagai fasilitas yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi.
- Tekanan terhadap ruang fiskal semakin terlihat dari meningkatnya belanja rutin dan pembayaran bunga utang, dengan belanja pegawai mencapai sekitar Rp625,24 triliun dan bunga utang sekitar Rp650,31 triliun. Kondisi tersebut membuat semakin besar bagian APBN yang sudah terikat untuk kewajiban rutin, sehingga pemerintah perlu memastikan setiap pengeluaran yang tersisa benar-benar memiliki dampak besar terhadap investasi, produktivitas, penciptaan pekerjaan, dan daya beli masyarakat.
- Karena itu, target pertumbuhan ekonomi mendekati 6% pada 2027 akan membutuhkan dukungan yang lebih kuat dari investasi, bukan hanya konsumsi dan belanja pemerintah. Pemerintah menargetkan investasi sekitar Rp2.322 triliun pada 2027, sehingga ketika ruang

belanja modal pemerintah semakin terbatas, peran investasi swasta, BUMN atau Danantara, serta investasi langsung asing menjadi semakin penting sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.

- Kebutuhan memperkuat investasi dan penciptaan pekerjaan tersebut juga terlihat di Jawa Tengah, ketika Pemprov menggelar Job Fair Hari Jadi ke-81 yang menyediakan 4.817 lowongan pekerjaan dari berbagai sektor. Sebanyak 48 perusahaan membuka kesempatan kerja di bidang manufaktur, agrikultur, alat berat, makanan dan jamu, kesehatan, farmasi, keuangan, pariwisata, perhotelan hingga ritel, termasuk sejumlah kesempatan bagi penyandang disabilitas.
- Pembukaan lapangan kerja menjadi semakin penting karena jumlah angkatan kerja Jawa Tengah terus bertambah, dengan jumlah angkatan kerja pada Februari 2026 mencapai 22,33 juta orang atau bertambah sekitar 455 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, realisasi investasi Jawa Tengah pada semester I 2026 mencapai Rp59,94 triliun dan menyerap 213.217 tenaga kerja, sehingga investasi diharapkan terus menghasilkan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Selain ketenagakerjaan, Jawa Tengah juga berusaha menangani kemiskinan dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan, salah satunya melalui Desa Kepyar di Wonogiri yang dijadikan lokasi pengembangan model pengentasan kemiskinan. Pemerintah tidak hanya mengandalkan bantuan langsung, tetapi melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMD, dunia usaha, Baznas, NGO, dan berbagai pihak untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat memperoleh penghasilan secara mandiri.
- Pendekatan di Desa Kepyar diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi yang sudah dimiliki masyarakat, mulai dari sekitar 596 hektare lahan pertanian, delapan kelompok tani, 12 UMKM, 15 pedagang mikro, hingga potensi wisata seperti agrowisata semangka dan melon, river tubing, Air Terjun Sanginan, serta Watu Lumbung. Melalui penguatan pertanian, UMKM, wisata, literasi, dan inklusi keuangan, masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang lebih luas sehingga tidak kembali masuk dalam kemiskinan setelah bantuan pemerintah berakhir.
- Namun, pembangunan desa masih menghadapi keterbatasan anggaran, seperti yang terjadi di Wonosobo setelah pemangkasan Dana Desa membuat sejumlah pemerintah desa harus menghitung kembali kemampuan keuangannya. Desa yang sebelumnya dapat memperoleh Dana Desa lebih dari Rp1 miliar kini ada yang hanya menerima sekitar Rp300 jutaan, sehingga ruang untuk membiayai pembangunan menjadi lebih terbatas dan pemerintah desa perlu mencari sumber pendapatan lainnya.
- Tantangan ekonomi masyarakat juga terlihat pada sektor garam di Rembang, ketika kemarau panjang membuat proses kristalisasi lebih cepat dan produksi garam meningkat dengan kualitas yang dinilai lebih baik. Namun, melimpahnya produksi justru menekan harga di tingkat petani hingga berada di sekitar Rp700 per kilogram dan bahkan sempat menyentuh Rp650 per kilogram, sehingga kenaikan produksi belum otomatis memberikan peningkatan pendapatan kepada petani.
- Secara keseluruhan, rangkaian berita dari internasional, Indonesia hingga Jawa Tengah saling berhubungan, karena ketegangan geopolitik, tingginya harga energi, persoalan utang AS, dan perubahan pasar keuangan global dapat memengaruhi rupiah, inflasi, investasi, dan kebijakan pemerintah Indonesia. Kondisi nasional tersebut kemudian berpengaruh sampai ke daerah melalui kemampuan pemerintah membiayai pembangunan, penciptaan lapangan kerja, perkembangan investasi, pengentasan kemiskinan, serta pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, stabilitas ekonomi perlu diikuti dengan penggunaan anggaran yang tepat, investasi yang produktif, penciptaan pekerjaan yang lebih luas, serta kebijakan daerah yang mampu memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Implikasi

- Tekanan ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran dapat membuat kondisi dunia semakin tidak pasti. Tekanan ini bukan hanya ditujukan kepada Iran, tetapi juga dapat berdampak pada negara, perusahaan, atau lembaga yang masih membantu Iran. Jika ketegangan terus berlangsung, perdagangan dan pasokan energi dari Timur Tengah dapat terganggu sehingga harga energi dunia tetap berisiko tinggi.
- Utang pemerintah AS yang sudah mencapai lebih dari US\$40 triliun dapat semakin membebani keuangan negara tersebut. Semakin besar utang, semakin besar pula biaya bunga yang harus dibayar pemerintah. Akibatnya, sebagian anggaran harus digunakan untuk membayar kewajiban tersebut sehingga ruang untuk membiayai program lain atau menghadapi perlambatan ekonomi menjadi lebih terbatas.
- Besarnya utang AS juga dapat memengaruhi pasar keuangan dunia. Perubahan imbal hasil obligasi AS dapat membuat investor memindahkan dananya dari satu negara ke negara lain. Jika dana banyak kembali ke AS, mata uang negara berkembang dapat tertekan, sedangkan ketika tekanan dari AS berkurang, mata uang Asia memiliki kesempatan untuk kembali menguat.
- Tingginya harga energi memberikan tekanan kepada negara yang banyak mengimpor minyak seperti Jepang. Jepang mulai mencari pasokan minyak dari negara lain, termasuk Amerika Serikat, karena pasokan dari Timur Tengah terganggu. Namun, harga minyak yang lebih mahal tetap meningkatkan biaya impor dan produksi sehingga dapat mendorong kenaikan harga barang di dalam negeri.
- Di sisi lain, ekspor Jepang yang masih tumbuh kuat dapat membantu menjaga kegiatan ekonominya. Kenaikan ekspor sebesar 23,2% secara tahunan dapat membantu mengimbangi tekanan dari mahalnya impor energi. Karena itu, kekuatan ekspor menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga ekonomi Jepang di tengah kondisi global yang belum stabil.
- Penguatan beberapa mata uang Asia memberikan sedikit ruang bagi negara kawasan untuk menghadapi tekanan dolar AS. Rupiah, ringgit, peso, yuan, dan baht sempat menguat, tetapi kondisi ini masih dapat berubah karena sangat dipengaruhi kebijakan AS dan pergerakan dana investor. Oleh sebab itu, penguatan tersebut belum berarti tekanan terhadap mata uang Asia sudah sepenuhnya berakhir.
- Naiknya pengangguran Australia menjadi 4,5% dapat membuat bank sentral lebih berhati-hati menaikkan suku bunga. Kondisi tenaga kerja yang mulai melemah menunjukkan ekonomi tidak sekuat sebelumnya, sehingga kenaikan suku bunga tambahan dapat semakin menekan masyarakat dan dunia usaha. Namun, keputusan selanjutnya tetap akan melihat perkembangan inflasi dan kondisi ekonomi.
- Ketidakpastian ekonomi dunia membuat Bank Indonesia harus tetap berhati-hati dalam menentukan suku bunga. BI mempertahankan BI Rate sebesar 5,75% agar rupiah dan inflasi tetap terjaga, tetapi ekonomi masih mempunyai ruang untuk tumbuh. Kebijakan ini penting karena pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dari 5,61% pada kuartal I menjadi 5,29% pada kuartal II 2026.
- Kebijakan BI yang tetap mendukung likuiditas dapat membantu masyarakat dan dunia usaha memperoleh pembiayaan. Kredit perbankan pada Juli 2026 tumbuh 13,58% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Jika kredit tersebut lebih banyak digunakan untuk kegiatan produktif, maka usaha, investasi, produksi, dan lapangan kerja dapat terus berkembang.
- Perluasan fasilitas lindung nilai dapat membantu menjaga investasi asing di Indonesia. Fasilitas tersebut dapat mengurangi risiko kerugian akibat perubahan nilai rupiah bagi perusahaan dan investor. Dengan risiko yang lebih terjaga, investor diharapkan lebih nyaman menempatkan

dananya di Indonesia sehingga dapat membantu menjaga pasokan valuta asing dan stabilitas rupiah.

- Penguatan rupiah menjadi sekitar Rp17.746 per dolar AS memberikan dampak positif bagi ekonomi dalam jangka pendek. Rupiah yang lebih kuat dapat membantu mengurangi kenaikan biaya barang impor dan bahan baku. Namun, harga minyak yang masih tinggi tetap perlu diperhatikan karena dapat meningkatkan biaya energi, kebutuhan devisa, dan tekanan inflasi.
- Kenaikan subsidi energi pada 2027 dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Subsidi BBM, LPG 3 kilogram, dan listrik dapat menahan kenaikan biaya hidup, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, penyalurannya harus semakin tepat agar anggaran subsidi tidak banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu.
- Turunnya belanja modal hampir 20% dapat membuat pembangunan dan peningkatan kapasitas ekonomi menjadi lebih terbatas. Belanja modal dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan fasilitas produksi. Karena itu, penurunan anggaran ini dapat membuat target pertumbuhan ekonomi mendekati 6% pada 2027 menjadi lebih sulit jika tidak didukung investasi dan belanja produktif lainnya.
- Naiknya belanja pegawai dan pembayaran bunga utang juga membuat ruang anggaran pemerintah semakin sempit. Semakin besar anggaran yang digunakan untuk kebutuhan rutin dan membayar bunga, semakin kecil ruang untuk menambah program pembangunan baru. Oleh karena itu, pemerintah perlu memilih program yang benar-benar penting dan memberikan manfaat besar bagi ekonomi serta masyarakat.
- Kondisi tersebut membuat investasi swasta, BUMN atau Danantara, dan investasi asing semakin penting bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika kemampuan pemerintah membiayai pembangunan semakin terbatas, investasi dari pihak lain dibutuhkan untuk membuka usaha, meningkatkan produksi, dan menciptakan pekerjaan. Dengan demikian, target pertumbuhan tidak dapat hanya bergantung pada konsumsi dan belanja pemerintah.
- Job Fair yang menyediakan 4.817 lowongan dapat membantu masyarakat Jawa Tengah mendapatkan pekerjaan. Program ini juga membantu perusahaan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, pencari kerja tetap perlu meningkatkan keterampilan karena jumlah angkatan kerja terus bertambah dan persaingan mendapatkan pekerjaan juga semakin besar.
- Investasi Jawa Tengah sebesar Rp59,94 triliun pada semester pertama 2026 memberikan dampak positif terhadap lapangan kerja. Investasi tersebut telah menyerap 213.217 tenaga kerja, sehingga peningkatan investasi berikutnya dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja. Karena itu, investasi perlu terus diarahkan ke sektor yang dapat menyerap banyak pekerja dan memberikan manfaat bagi ekonomi daerah.
- Program pengentasan kemiskinan di Desa Kepyar dapat membuat masyarakat lebih mandiri jika dilakukan secara berkelanjutan. Program tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga mengembangkan pertanian, UMKM, wisata, keterampilan, dan pengetahuan keuangan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat diharapkan memiliki sumber penghasilan sendiri dan tidak kembali miskin setelah bantuan selesai.
- Kerja sama berbagai pihak juga menjadi penting dalam mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri sehingga diperlukan dukungan perguruan tinggi, dunia usaha, Baznas, NGO, dan masyarakat. Kerja sama tersebut dapat membuat program tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga memberikan keterampilan dan kesempatan usaha kepada masyarakat.
- Pemangkasan Dana Desa dapat membuat pembangunan desa menjadi lebih terbatas. Beberapa desa yang sebelumnya menerima lebih dari Rp1 miliar kini hanya mendapatkan sekitar Rp300 jutaan. Karena itu, pemerintah desa perlu lebih baik mengatur anggaran sekaligus mencari sumber pendapatan lain agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

- Turunnya harga garam di Rembang menunjukkan bahwa produksi yang banyak belum tentu meningkatkan pendapatan petani. Kemarau membuat produksi garam meningkat dan kualitasnya lebih baik, tetapi banyaknya pasokan justru membuat harga turun hingga sekitar Rp650–Rp700 per kilogram. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi juga perlu diikuti dengan penyerapan pasar yang baik agar harga tetap menguntungkan petani.